

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan elemen krusial dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang diundangkan secara resmi pada 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelahnya, terdapat sejumlah ketentuan hukum di Indonesia. Pada era digital saat ini, keterbukaan informasi tidak hanya merujuk sebagai bentuk mekanisme konvensional, seperti pengumuman resmi namun juga terdapat peran dinamis dari media sosial sebagai bentuk penyebaran informasi yang lebih cepat dan meluas. Hal ini didukung pula oleh hadirnya penyebaran internet sebagai alat komunikasi, terutama di kalangan Generasi Z. Penyebaran informasi publik dinilai jauh lebih efektif apabila dilakukan pada media sosial, seperti Instagram dan Tiktok.

Generasi Z, yang lahir dan besar di era digital, memiliki kecenderungan untuk mencari informasi melalui *platform* media sosial dibandingkan dengan media konvensional. Kota Semarang telah memanfaatkan media sosial untuk mendukung keterbukaan informasi publik, baik melalui akun resmi pemerintah maupun inisiatif komunitas. Platform seperti Instagram dan Tiktok digunakan untuk menyampaikan kebijakan, program, dan layanan publik dengan cara yang lebih interaktif dan mudah dipahami oleh anak muda. Namun, efektivitas media sosial dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik masih menjadi pertanyaan penting, terutama

terkait sejauh mana terpaan media sosial mampu meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan partisipasi Generasi Z dalam mengakses serta memanfaatkan informasi publik. Adapun hal ini merujuk pada inti dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang terdiri dari 64 pasal ini adalah kewajiban bagi setiap badan publik untuk menyediakan informasi publik, kecuali untuk beberapa informasi yang ditetapkan sebagai rahasia negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari penerapan undang-undang ini adalah:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan atau

7. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan oleh pemerintah menjelaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan dan menyebarluaskan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat. Regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, sebagai bentuk implementasi dari undang-undang tersebut di tingkat daerah, Pemerintah Kota Semarang menerbitkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, yang menegaskan komitmen pemerintah kota dalam memastikan akses informasi yang mudah bagi masyarakat. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, pemanfaatan media sosial seperti Instagram dan TikTok justru menjadi salah satu strategi utama dalam mendukung keterbukaan informasi publik, terutama dalam menjangkau Generasi Z sebagai kelompok yang paling aktif menggunakan *platform* tersebut.

Dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022, disebutkan bahwa penyampaian informasi publik harus dilakukan dengan prinsip cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Peraturan ini memiliki beberapa tujuan yang diatur dalam kebijakan tersebut, yakni:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik;
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
3. Melindungi hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik;
4. Mengembangkan budaya keterbukaan informasi di Kota Semarang.

Peraturan Walikota ini mengatur tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, meliputi:

1. Pengertian informasi dan dokumentasi publik;
2. Hak dan kewajiban badan publik dan masyarakat;
3. Klasifikasi informasi publik;
4. Prosedur penyampaian dan permohonan informasi publik;
5. Penyelesaian sengketa informasi publik;
6. Peran dan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
7. Standar Layanan Informasi Publik;
8. Monitoring dan Evaluasi.

Kebijakan pemerintah Kota Semarang mengenai keterbukaan informasi publik menjadi dasar bagi masyarakat untuk mengakses informasi penting yang berdampak pada kehidupan sehari-hari. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi pengembangan diri, baik secara pribadi maupun dalam konteks sosial. Dengan kebijakan keterbukaan informasi publik ini, pemerintah sebagai lembaga

pelayanan publik diharapkan dapat berfungsi sebagai wadah yang terbuka, dinamis, dan komunikatif bagi masyarakat. Seiring dengan tuntutan demokratisasi di berbagai sektor, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kemajuan daerah dan mendukung berbagai program pembangunan yang ada.

Keterbukaan informasi publik mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kebijakan publik. Diharapkan pemerintah dan lembaga publik dapat menyediakan informasi yang jelas, transparan, dan akuntabel mengenai aktivitas mereka, sehingga dapat membantu menciptakan pengelolaan yang bersih dan efisien. Hak-hak masyarakat yang perlu dihormati dan dilindungi meliputi kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers, hak untuk mengakses informasi publik, hak untuk terlibat dalam penyusunan kebijakan publik, dan hak untuk berpartisipasi secara aktif. Dalam proses kebijakan publik, aspek ini sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang lebih partisipatif dan berpihak pada kepentingan publik secara luas.

Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan diadopsi oleh pemerintah Kota Semarang menjadi pedoman bagi setiap perangkat daerah dalam mengelola serta menyebarluaskan informasi publik secara efektif, cepat, dan mudah diakses. Salah satu aspek penting yang diatur dalam peraturan ini adalah pemanfaatan teknologi digital dalam penyebaran informasi, yang sejalan dengan tren komunikasi modern yang semakin bergeser ke platform digital. Dalam konteks ini, media sosial seperti Instagram dan TikTok menjadi sarana strategis bagi Pemerintah Kota Semarang untuk memperkuat implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Peraturan ini juga menekankan

bahwa informasi publik harus mudah dipahami dan dikemas secara menarik, sehingga dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Platform media sosial seperti TikTok dan Instagram membuat keterbukaan informasi menjadi lebih mudah diakses oleh publik. Setiap peristiwa di suatu daerah berpotensi menjadi viral, terutama jika berkaitan dengan kebijakan pemerintah, isu sosial, dan pelayanan publik. Kemajuan teknologi informasi ini mendorong lembaga-lembaga pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Semarang, untuk memiliki akun resmi yang digunakan dalam memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan informasi publik yang tersebar. Media sosial memungkinkan komunikasi dua arah, di mana masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat memberikan tanggapan, kritik, dan masukan terhadap kebijakan yang diterapkan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan keterbukaan informasi publik, yaitu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Pengguna media sosial di Indonesia telah menjadi fenomena yang signifikan, melibatkan enam generasi yang dibedakan berdasarkan tahun kelahiran serta karakteristik sosial, budaya, dan teknologi yang mempengaruhi mereka. Baby Boomers (1946-1964) tumbuh dalam stabilitas ekonomi pasca-Perang Dunia II. Mereka dikenal pekerja keras, mandiri, dan menghargai pendidikan, meskipun seringkali sulit menerima kritik dari generasi muda. Generasi X (1965-1980) menjadi jembatan antara *Baby Boomers* dan Milenial. Mereka menyaksikan transisi dari teknologi analog ke digital, sehingga lebih

adaptif. Karakteristik mereka mencakup sikap skeptis dan pragmatisme, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi.

Generasi Y (Milenial, 1981-1996) tumbuh di era digital, menjadikan mereka akrab dengan internet dan media sosial. Mereka dikenal kreatif, ekspresif, dan memiliki pandangan progresif terhadap isu-isu sosial, meskipun sering menghadapi stres akibat tekanan sosial. Generasi Z (1997-2012), atau *iGeneration*, sangat melek teknologi dan pragmatis. Mereka tumbuh dalam lingkungan yang terhubung secara digital, memiliki kesadaran tinggi terhadap isu sosial, dan cenderung fleksibel dalam cara bekerja. Terakhir, Generasi Alpha (setelah 2013) adalah generasi termuda yang dibesarkan dalam era kecerdasan buatan dan teknologi canggih. Diprediksi akan menjadi generasi paling terdidik, mereka menunjukkan potensi inovatif dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Setiap generasi di Indonesia mencerminkan dinamika sosial dan teknologi yang berbeda-beda, membentuk pola pikir serta cara berinteraksi satu sama lain dalam masyarakat yang terus berkembang.

Tabel 1 . 1 Survei 2024 Media Sosial di Indonesia

Aplikasi	Gen Z (Kelahiran >2013/Kurang dari 12th)	Milenial (Kelahiran 1981-1996)	Gen x (Kelahiran 1965-1980)	Baby boomers (Kelahiran 1946- 1964)
Facebook	51,64%	74,09%	66,30%	56,59%
Instagram	51,90%	22,14%	12,91%	12,79%
Youtube	38,63%	53,42%	62,91%	61,63%
TikTok	46,84%	31,72%	23,66%	13,57%
X	1,98%	0,77%	0,39%	0,00%
Linkedin	0,08%	0,03%	0,00%	0,00%
?	0,67%	1,94%	5,15%	12,79%
dll	1,22%	1,70%	2,61%	1,94%

Sumber: APJII 2024

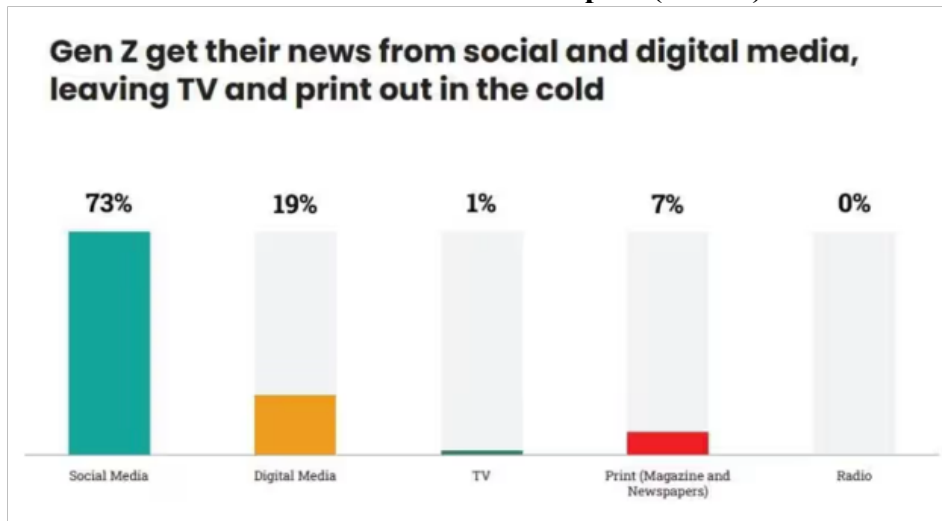
Berdasarkan data dari APJII 2024, Generasi Z (kelahiran setelah 2013, kurang dari 12 tahun) mendominasi pengguna internet di Indonesia dengan tingkat penetrasi mencapai 87,02% dan kontribusi 34,40% terhadap total pengguna internet. tingkat penggunaan media sosial yang tinggi, terutama di platform Instagram dan TikTok. Mereka menempati peringkat pertama dalam penggunaan Instagram dengan persentase 51,90% dan 46,84% di TikTok. Sementara itu, Milenial (lahir 1981-1996) juga menunjukkan angka signifikan di Instagram dengan 74,09%, meskipun tidak seaktif Generasi Z di TikTok. Keterlibatan Generasi X (lahir 1965-1980) dan Baby Boomers (lahir 1946-1964) jauh lebih rendah, dengan Baby Boomers mencatat angka terendah di kedua platform, mencerminkan keterbatasan ketertarikan mereka terhadap media sosial. Walaupun begitu, hasil dari Survei APJII ini menunjukkan bahwa Generasi Z tidak hanya menjadi pengguna terbanyak tetapi juga berperan penting dalam perubahan pola komunikasi dan konsumsi konten digital di masyarakat.

Generasi Z dianggap sebagai generasi *digital native*, di mana mereka tumbuh di era teknologi dan internet yang terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya menggunakan media sosial untuk dapat terhubung secara sosial, Gen Z juga menggunakan *platform* tersebut untuk dapat mencari informasi, hiburan, dan membangun identitas digital. Terpaan media sosial mencerminkan seberapa sering dan intens seseorang melihat, membaca, atau berinteraksi dengan konten yang disajikan di dalam media sosial. Generasi Z, yang dikenal sebagai digital natives, memiliki tingkat terpaan

media yang tinggi karena mereka secara aktif mengonsumsi informasi dari berbagai sumber digital dalam kehidupan sehari-hari. Terpaan media sosial dapat memengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku Generasi Z terhadap suatu isu, termasuk keterbukaan informasi publik.

Pola konsumsi media Generasi Z menunjukkan bahwa mereka menghabiskan lebih banyak waktu di media digital dibandingkan dengan media tradisional. Media sosial telah menjadi sumber utama informasi dan hiburan bagi mereka. Kebutuhan untuk membangun konektivitas dan mengkonstruksi identitas digital mendorong Generasi Z untuk memanfaatkan media sosial sebagai platform yang efektif dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagai kelompok yang lahir antara tahun 1997 dan 2012, Generasi Z merupakan entitas yang unik dan berpengaruh dalam konteks sosial dan teknologi saat ini. Mereka tumbuh di tengah kemajuan teknologi yang pesat, dengan akses luas terhadap internet dan perangkat digital sejak usia dini. Karakteristik ini membentuk pola pikir dan perilaku mereka dalam berinteraksi dengan dunia.

Gambar 1 . 1 Indonesia Gen Z Report (IMGR) 2024

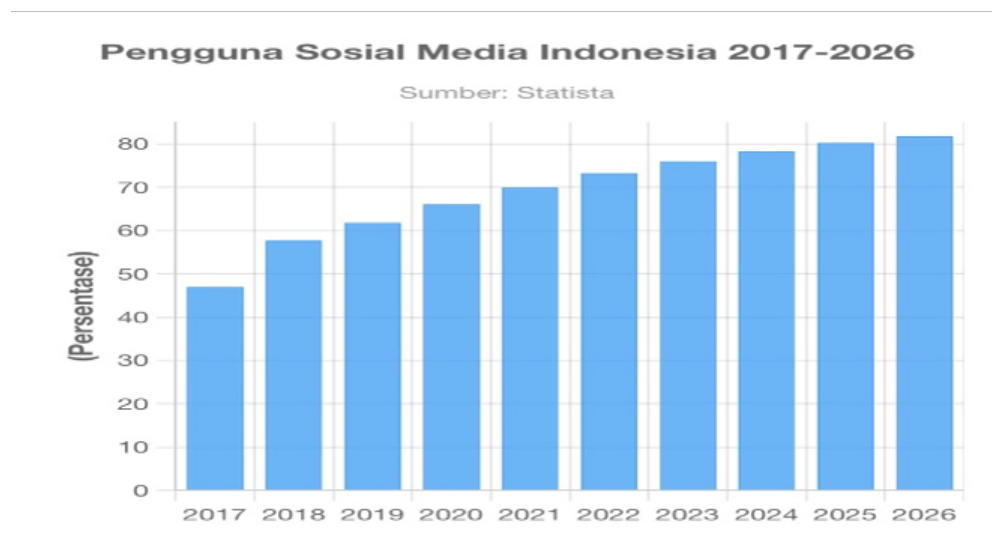


Sumber: *idntimes.com*

Berdasarkan gambar 1.1, dapat terlihat bahwa Generasi Z (Gen Z) di Indonesia lebih memilih mencari berita melalui media sosial dibandingkan dengan portal berita tradisional. Survei menunjukkan bahwa 73% Gen Z mengonsumsi berita dari media sosial. Ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam cara mereka mendapatkan informasi, dengan Instagram menjadi platform terpopuler untuk berita, diikuti oleh TikTok dan Twitter. Gen Z menganggap media sosial sebagai sumber utama informasi, terutama untuk berita politik dan isu-isu terkini. Akun seperti “@Folkative” di Instagram sangat populer di kalangan Gen Z sedangkan pada media tradisional seperti CNN Indonesia dan detik.com juga memiliki pengikut, tetapi tidak sebanding dengan popularitas media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Gen Z lebih menyukai konten yang dikemas secara visual dan ringkas, yang sesuai dengan gaya konsumsi informasi mereka yang cepat.

Terpaan media sosial memiliki peran signifikan dalam membentuk pola konsumsi informasi. Dalam konteks keterbukaan informasi publik, terpaan media terjadi ketika individu secara terus-menerus menerima paparan konten dari akun resmi pemerintah, media independen, maupun aktivis sosial yang membahas kebijakan publik. Algoritma platform media sosial yang menyesuaikan konten berdasarkan preferensi pengguna semakin memperkuat terpaan ini, membuat publik, seperti Generasi Z, lebih sering terpapar informasi yang diinginkan. Menurut Kaplan dan Haenlein (2010), media sosial terdiri dari serangkaian aplikasi berbasis internet yang memfasilitasi kolaborasi serta pembagian informasi secara daring. Saat ini, platform-platform seperti Instagram dan TikTok dimanfaatkan untuk mendistribusikan informasi dengan cepat kepada sejumlah besar pengguna internet.

Gambar 1 . 2 Pengguna Media Sosial Indonesia 2012-2023 dan Prediksi 2026



Sumber: *Statistica.com*

Menurut data dari *Statista.com*, tren pertumbuhan pengguna media sosial di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2026 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pengguna media sosial meningkat dari sekitar 47% pada tahun 2017, dan diperkirakan akan mencapai 81,82% pada tahun 2026. Pertumbuhan ini menandakan bahwa media sosial semakin menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mencerminkan pergeseran pola komunikasi dan interaksi sosial yang semakin digital. Gambar tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media sosial di Indonesia sangat masif dan terus berkembang setiap tahunnya. Hal ini sejalan dengan tren digitalisasi dan perubahan pola konsumsi informasi yang semakin berfokus pada platform media sosial. Angka-angka yang disajikan memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika dan pertumbuhan ekosistem media sosial di Indonesia dalam rentang waktu yang cukup panjang.

Bagi Generasi Z, keterbukaan informasi publik melalui media sosial bukan hanya soal akses, tetapi juga soal keterlibatan aktif dalam diskusi kebijakan dan layanan publik. Karakteristik Generasi Z yang kritis, dinamis, dan cenderung lebih percaya pada informasi berbasis visual menjadikan Instagram dan TikTok sebagai platform yang potensial dalam meningkatkan transparansi publik. Dominasi media sosial saat ini menarik perhatian peneliti untuk membahas pemanfaatan platform ini oleh Generasi Z. Format konten yang menarik, seperti video singkat di TikTok atau infografis di Instagram, dapat meningkatkan daya tarik dan efektivitas terpaan media terhadap audiens muda. Platform ini memungkinkan mereka untuk berbagi foto, video, dan konten visual lainnya, yang sejalan dengan preferensi mereka dalam berkomunikasi. Selain itu,

Instagram dan TikTok menyediakan fitur interaktif seperti "stories" dan "reels" yang semakin populer di kalangan generasi ini, mendukung gaya hidup yang dinamis dan penuh kreativitas.

Terpaan media sosial dapat bersifat aktif maupun pasif. Generasi Z yang secara aktif mencari informasi melalui fitur pencarian atau mengikuti akun-akun publik mendapatkan terpaan aktif yang membentuk pemahaman lebih dalam mengenai keterbukaan informasi publik. Sementara itu, terpaan pasif terjadi ketika mereka menemukan konten informatif melalui rekomendasi algoritma atau unggahan yang viral. Baik aktif maupun pasif, proses ini menciptakan eksposur berulang yang dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka terhadap hak-hak informasi publik yang dijamin oleh undang-undang. Instagram dan TikTok sendiri memiliki karakteristik unik dalam penyebaran informasi yang mempengaruhi intensitas terpaan. Instagram cenderung menyajikan informasi dalam bentuk infografis, carousel post, dan story yang singkat tetapi padat. Sementara TikTok, dengan format video pendek yang dinamis dan berbasis tren, mampu menarik perhatian Generasi Z dengan penyajian informasi yang lebih interaktif. Akibatnya, keterbukaan informasi publik tidak lagi bersifat satu arah, melainkan terjadi diskusi dan umpan balik yang cepat melalui kolom komentar atau fitur duetting dan stitching di TikTok.

Peran media sosial dalam kehidupan Generasi Z sangat signifikan, terutama dalam konteks akses informasi dan partisipasi publik. Dengan kemampuan untuk menyebarkan informasi secara cepat dan luas, media sosial menjadi alat utama bagi Gen Z untuk mendapatkan berita dan berinteraksi dengan isu-isu sosial dan politik. Di Kota Semarang,

implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dapat memanfaatkan kecenderungan ini dengan memfasilitasi akses yang lebih baik terhadap informasi pemerintah melalui platform digital. Sehingga tingginya antusiasme Generasi Z sudah seharusnya pemerintah memainkan perannya untuk memanfaatkan media sosial menjadi sarana penyebaran informasi publik.

Pemerintah Kota Semarang memiliki peran strategis dalam memastikan keterbukaan informasi publik sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022. Sebagai pusat kebijakan di tingkat daerah, Pemkot Semarang dituntut untuk menyediakan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Terpaan media sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang melalui platform seperti Instagram dan TikTok dapat meningkatkan efektivitas penyampaian informasi publik. Dengan fitur-fitur seperti Instagram Stories, Reels, Live Streaming, serta video pendek di TikTok, pemerintah dapat menyajikan informasi secara lebih visual dan interaktif, sehingga lebih mudah dipahami dan menarik bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Melihat tingginya antusiasme Generasi Z, Kota Semarang juga menjadi salah satu kota yang memiliki akun media sosial dengan followers cukup tinggi. Kota Semarang juga memiliki latar belakang sosial dan budaya yang kaya, yang memengaruhi cara Generasi Z berinteraksi dengan media sosial. Keberagaman komunitas dan tradisi yang ada di kota ini memberikan konteks yang menarik untuk memahami bagaimana faktor-faktor tersebut berkontribusi pada cara generasi muda menggunakan platform media sosial untuk berdiskusi dan berpartisipasi dalam isu-isu publik. Selain itu, banyaknya

komunitas kreatif dan inisiatif lokal yang aktif di media sosial membuka peluang untuk mengkaji dampak positif dari penggunaan media sosial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik.

Terpaan media yang tinggi juga mendorong Generasi Z untuk menjadi lebih kritis dalam menanggapi kebijakan pemerintah. Jika sebelumnya transparansi informasi hanya bergantung pada media konvensional, kini media sosial memungkinkan mereka melakukan verifikasi silang dengan berbagai sumber, termasuk media sosial dan opini publik. Terpaan yang terus-menerus dari berbagai sudut pandang dapat membentuk opini yang lebih objektif atau bahkan mendorong partisipasi aktif dalam advokasi keterbukaan informasi publik, seperti membuat petisi digital atau kampanye sosial. Dengan kuatnya terpaan media sosial, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Semarang menjadi semakin dinamis. Pemerintah perlu menyadari bahwa terpaan ini tidak hanya memengaruhi cara Generasi Z menerima informasi, tetapi juga ekspektasi mereka terhadap transparansi dan responsivitas pemerintah.

Kota Semarang telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap transparansi melalui berbagai program dan inisiatif pemerintah, seperti penyediaan situs resmi dan aplikasi yang memudahkan akses informasi publik. Hal ini menjadikan kota ini sebagai contoh konkret untuk mengeksplorasi bagaimana media sosial dapat berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, terutama generasi muda. Generasi Z di Semarang, yang sangat aktif dalam menggunakan media sosial, dengan tingkat keterlibatan yang tinggi di platform-platform seperti Instagram dan TikTok, berperan penting dalam mengakses, memproses, dan menyebarkan informasi terkait kebijakan

publik. Konten kreatif yang dihasilkan di TikTok, misalnya, dapat menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami, sehingga meningkatkan kesadaran tentang kebijakan keterbukaan informasi.

Salah satu permasalahan yang sering muncul di kalangan Generasi Z adalah rendahnya tingkat literasi digital, meskipun mereka dikenal sebagai *digital natives*. Meskipun tumbuh di era teknologi dan internet, tidak semua anggota Generasi Z memiliki kemampuan yang memadai untuk mencari, memahami, dan mengevaluasi informasi publik secara efektif. Berdasarkan Indeks Literasi Digital Indonesia yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bekerja sama dengan Katadata Insight Center (KIC), indeks literasi digital Indonesia pada tahun 2020 berada di angka 3,46 poin. Angka ini meningkat menjadi 3,49 poin pada tahun 2021 dan mencapai 3,54 poin pada tahun 2022, dengan skala penilaian dari 0 hingga 5.

Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan dalam pemahaman dan penggunaan teknologi digital di Indonesia. Namun, secara keseluruhan, tingkat literasi digital masih dapat dikategorikan rendah, terutama dalam aspek kemampuan memilah informasi yang benar dan kredibel. Kesenjangan dalam literasi digital ini dapat memengaruhi kemampuan Generasi Z dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi publik secara optimal. Selain itu, rendahnya literasi digital juga membuat mereka lebih rentan terhadap penyebaran informasi yang salah atau hoaks, yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dan membingungkan mereka dalam mengambil keputusan terkait berbagai isu publik.

Keterbukaan informasi publik tidak hanya berfungsi sebagai alat transparansi pemerintahan, tetapi juga dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, khususnya Generasi Z. Melalui kebijakan keterbukaan informasi publik, pemerintah dapat menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi digital. Selain itu, platform media sosial seperti Instagram dan TikTok dapat dimanfaatkan sebagai media sosialisasi kebijakan dan regulasi daerah, termasuk dalam mendiskusikan solusi atas pelanggaran peraturan daerah serta memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam mengakses informasi publik.

Informasi yang tidak akurat di media sosial menjadi masalah serius bagi Generasi Z, yang sering mengandalkan platform-platform ini untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan publik. Meskipun dikenal sebagai generasi yang terampil dalam teknologi, tidak semua anggota Generasi Z memiliki keterampilan yang memadai untuk membedakan antara informasi yang valid dan tidak valid. Menurut laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada tahun 2023, sekitar 60% informasi yang beredar di media sosial mengenai kebijakan publik di Semarang mengandung unsur misleading atau tidak akurat. Angka ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh Generasi Z dalam menghadapi banjir informasi yang mereka terima setiap hari. Banyak dari mereka mungkin tidak menyadari bahwa informasi yang mereka konsumsi dapat dipengaruhi oleh bias, agenda tertentu, atau bahkan disebarkan sebagai hoaks secara sengaja. Ketidakakuratan informasi ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan Generasi Z, sehingga mereka mungkin mengambil keputusan yang tidak tepat atau memiliki

pandangan keliru tentang isu-isu publik yang penting. Lebih lanjut, rendahnya kemampuan untuk mengidentifikasi informasi yang salah dapat mengurangi kepercayaan mereka terhadap lembaga pemerintah dan proses kebijakan publik, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada partisipasi aktif mereka dalam masyarakat.

Minimnya interaksi antara Generasi Z dan pemerintah menjadi permasalahan signifikan, meskipun mereka sangat aktif di media sosial. Data dari survei yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Semarang pada tahun 2024 menunjukkan bahwa hanya 25% dari Generasi Z yang pernah berinteraksi langsung dengan akun resmi pemerintah melalui platform media sosial. Sumber informasi ini dapat ditemukan dalam artikel yang membahas kegiatan "Lapor Semarang Goes to Campus" yang diadakan oleh Diskominfo, di mana mereka berupaya memperkenalkan kanal komunikasi kepada Generasi Z dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pengaduan dan layanan publik. Angka ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam dialog antara generasi muda dan lembaga pemerintah, yang seharusnya dapat memfasilitasi komunikasi dua arah yang konstruktif. Banyak anggota Generasi Z mungkin merasa bahwa suara mereka tidak terdengar atau tidak berpengaruh terhadap kebijakan publik, yang dapat mengurangi motivasi mereka untuk terlibat. Selain itu, kurangnya respons atau keterlibatan nyata dari pemerintah dalam diskusi di media sosial dapat memperburuk persepsi bahwa pemerintah tidak peduli terhadap aspirasi dan kebutuhan generasi muda.

Generasi Z cenderung lebih suka mengikuti akun berita seperti Folktive, USS Feeds, CNN Indonesia, dan lainnya dibandingkan dengan akun resmi pemerintah,

terutama akun pemerintah kota. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan preferensi konten dan interaksi sosial. Pertama, platform seperti Instagram dan TikTok menawarkan konten yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebiasaan konsumsi media Generasi Z, yang lebih menyukai informasi cepat, visual, dan mudah dicerna. Akun berita seperti Folkative, USS Feeds, dan CNN Indonesia sering kali menyajikan informasi dengan cara yang lebih kreatif, ringkas, dan menghibur, sehingga lebih menarik perhatian dibandingkan dengan gaya penyampaian yang cenderung formal di akun resmi pemerintah.

Kedua, banyak anggota Generasi Z merasa bahwa akun resmi pemerintah kurang responsif atau tidak mampu menciptakan dialog yang konstruktif. Hal ini membuat mereka merasa suara mereka tidak didengar dalam pengambilan keputusan publik, sehingga mengurangi motivasi untuk berinteraksi dengan akun-akun tersebut. Sebaliknya, akun berita seperti Folkative, USS Feeds, dan CNN Indonesia sering kali memberikan ruang diskusi yang lebih dinamis, memungkinkan Generasi Z untuk berpartisipasi dalam pembicaraan yang relevan dan mendengarkan perspektif yang lebih beragam. Untuk itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan strategi komunikasi dan interaksi dengan Generasi Z agar mereka merasa lebih terlibat dan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Kurangnya pemahaman tentang keterbukaan informasi publik di kalangan Generasi Z merupakan masalah signifikan yang berdampak pada kemampuan mereka untuk mengakses dan memanfaatkan informasi yang seharusnya menjadi hak mereka.

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mencatat bahwa meskipun Generasi Z memiliki sikap keterbukaan yang tinggi terhadap informasi baru, mereka sering kali tidak menyadari hak konstitusional mereka untuk mengakses informasi publik. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keinginan untuk tahu dan pemahaman yang memadai tentang hak-hak tersebut. Selain itu, rendahnya literasi politik di kalangan Generasi Z dapat mengurangi partisipasi mereka dalam diskusi kebijakan publik, sehingga menghambat kemampuan mereka untuk menggunakan informasi yang dapat memberdayakan mereka. Ketidakpahaman ini dapat menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk terlibat dalam diskusi yang berkaitan dengan kebijakan publik dan tidak memanfaatkan informasi yang dapat memberdayakan mereka. Rendahnya pengetahuan tentang keterbukaan informasi juga dapat mengurangi akuntabilitas pemerintah, karena Generasi Z tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk menuntut transparansi dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Adapun salah satu permasalahan utama dari terpaan media ini adalah selektivitas algoritma yang dapat menciptakan *filter bubble*—membatasi informasi yang diterima oleh Generasi Z hanya pada konten yang selaras dengan preferensi mereka. Akibatnya, keterbukaan informasi yang seharusnya inklusif bisa menjadi bias dan terfragmentasi, hanya menjangkau kelompok yang sudah peduli terhadap isu tersebut.

Persepsi negatif terhadap media sosial sebagai alat untuk menyampaikan informasi resmi menjadi masalah signifikan di kalangan Generasi Z. Meskipun mereka aktif menggunakan berbagai platform media sosial, banyak di antara mereka yang menganggap informasi yang disampaikan melalui media sosial kurang kredibel. Selain

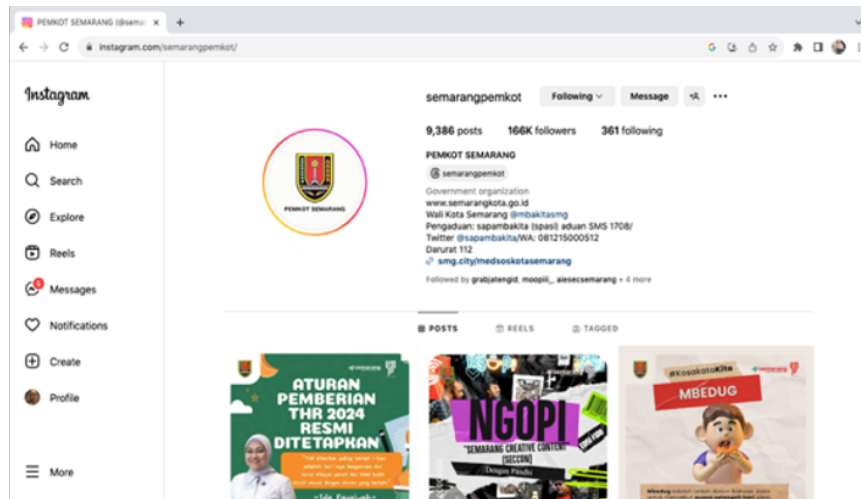
itu, terpapar media sosial yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan pemahaman yang lebih baik terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik. Karakteristik TikTok dan Instagram yang mengutamakan konten singkat dan viral sering kali menyebabkan penyederhanaan informasi yang berlebihan, berisiko menghasilkan *misinterpretasi* atau bahkan *misinformasi*. Banyak konten yang berfokus pada tren atau narasi emosional tanpa menyertakan konteks mendalam, sehingga Generasi Z lebih mudah terpengaruh oleh opini populer daripada analisis kebijakan yang berbasis data. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keterbukaan informasi semakin mudah diakses, kualitas pemahaman terhadap substansi kebijakan masih menjadi tantangan besar.

Data dari survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Masyarakat Milenial (LPMM) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 64,2% Generasi Z dapat menemukan, menganalisis, dan berpendapat mengenai situasi politik yang sedang hangat dibicarakan melalui media sosial. Namun, meskipun mereka aktif, terdapat keraguan yang tinggi terhadap keakuratan informasi yang disampaikan melalui platform tersebut. Persepsi ini dapat disebabkan oleh tingginya jumlah informasi yang tidak akurat atau hoaks yang beredar di media sosial, yang semakin memperburuk kepercayaan mereka terhadap informasi yang tersedia. Ketidakpercayaan ini dapat menghambat partisipasi mereka dalam diskusi publik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, karena mereka merasa informasi yang diterima tidak dapat diandalkan. Dalam konteks ini, peran akun resmi media sosial pemerintah kota Semarang, terutama di platform seperti Instagram dan TikTok, menjadi sangat krusial. Dengan memanfaatkan media sosial, pemerintah dapat

menjangkau Generasi Z secara lebih efektif, menyebarkan informasi mengenai UU Keterbukaan Informasi Publik, serta memberikan edukasi yang diperlukan.

Melalui konten yang menarik dan relevan, akun resmi tersebut dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman Generasi Z tentang hak-hak mereka, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang keterbukaan informasi melalui program edukasi dan kampanye yang menargetkan Generasi Z, sehingga mereka dapat lebih aktif dalam menggunakan hak mereka untuk mengakses informasi yang relevan dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih transparan dan partisipatif. Situs resmi pemerintah dan pejabat publik juga dapat dimanfaatkan secara efektif sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terkait berbagai isu pembangunan, kebijakan, dan pelayanan publik. Hal ini merupakan fenomena positif, di mana semua lapisan masyarakat dapat berkomunikasi langsung tanpa adanya batasan atau sekat-sekat protokoler dengan para pengambil kebijakan utama.

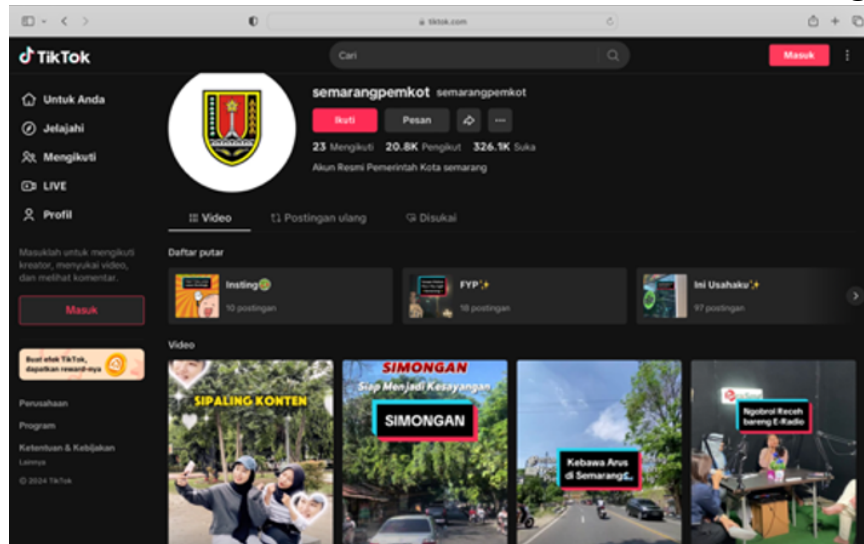
Gambar 1 . 3 Akun Resmi Instagram Pemerintah Kota Semarang



Sumber: Instagram @semarangpemkot

Akun Instagram resmi Pemerintah Kota Semarang, @semaranganpemkot, pertama kali dibuat untuk memperkuat komunikasi dan informasi kepada masyarakat. Dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang, akun ini telah berhasil menarik perhatian dengan lebih dari 166.000 pengikut hingga saat ini, menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak diluncurkan. Dengan lebih dari 9.800 postingan, akun ini menunjukkan keaktifan dalam memberikan informasi dan konten menarik yang relevan bagi warga. Selain itu, akun ini juga responsif dalam menanggapi komentar dan pertanyaan dari netizen, mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun komunikasi yang terbuka dan transparan. Dengan memanfaatkan platform media sosial ini, akun Instagram telah menjadi sumber informasi penting bagi masyarakat Kota Semarang, memungkinkan warga untuk tetap terhubung dan terinformasi mengenai kebijakan serta program pemerintah.

Gambar 1 . 4 Akun Resmi TikTok Pemerintah Kota Semarang



Sumber: TikTok @semarangpemkot

Akun TikTok resmi Pemerintah Kota Semarang dengan nama pengguna @semarangpemkot merupakan platform resmi yang dikelola dan digunakan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk menyampaikan informasi, layanan, serta interaksi dengan warga Kota Semarang. Berdasarkan informasi yang ditampilkan, akun ini memiliki 23 ribu pengikut (*followers*) dan 20,8 ribu orang yang mengikuti (*following*). Jumlah konten yang telah diunggah mencapai 326,1 ribu video. Hal ini menunjukkan bahwa akun ini cukup aktif dan memiliki interaksi yang tinggi dengan pengguna TikTok di Kota Semarang. Selain itu, profil akun ini juga mencantumkan bahwa akun ini merupakan "Akun Resmi Pemerintah Kota Semarang", yang mengindikasikan bahwa akun ini merupakan saluran resmi dan terpercaya untuk menyampaikan informasi publik dari Pemerintah Kota Semarang.

Melalui akun ini, Pemerintah Kota Semarang dapat memanfaatkan platform TikTok sebagai sarana untuk menginformasikan berbagai program, kebijakan, serta

kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Penggunaan TikTok dapat membantu menjangkau dan berinteraksi dengan generasi muda, khususnya Generasi Z, yang menjadi salah satu target utama dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Secara keseluruhan, keberadaan akun TikTok resmi Pemerintah Kota Semarang ini merupakan upaya strategis untuk memanfaatkan media sosial dalam menyampaikan informasi publik dan meningkatkan keterlibatan masyarakat, terutama di kalangan Generasi Z, dalam isu-isu dan kebijakan pemerintah daerah. Akun ini juga aktif menanggapi komentar dan pertanyaan dari netizen, menunjukkan komitmen untuk membangun komunikasi yang terbuka dan transparan dengan masyarakat. Dengan memanfaatkan platform media sosial untuk membangun komunikasi yang efektif maka akun ini telah menjadi sumber informasi penting bagi warga Kota Semarang.

Memilih Instagram dan TikTok sebagai platform implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang sangat strategis untuk menjangkau Generasi Z. Kedua platform ini populer di kalangan anak muda, dengan konten visual yang menarik dan mudah dipahami. Infografis dan video pendek memungkinkan penyampaian informasi yang lebih engaging, sementara fitur interaktif seperti stories, tanya jawab, dan live streaming mendorong dialog dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Kemampuan berbagi konten secara viral memperluas jangkauan informasi, meningkatkan kesadaran publik terhadap kebijakan keterbukaan informasi. Selain itu, aksesibilitas Instagram dan TikTok melalui smartphone menjadikannya lebih praktis bagi Generasi Z yang selalu terhubung. Dengan memanfaatkan karakteristik dan kebiasaan digital mereka, Pemerintah Kota Semarang dapat meningkatkan partisipasi publik,

memastikan informasi yang disampaikan akurat, relevan, dan mudah diakses. Secara keseluruhan, strategi ini dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan partisipatif.

Penelitian ini berfokus pada wilayah administratif Kota Semarang dengan pertimbangan bahwa, sebagai salah satu kota besar di Indonesia, partisipasi warga dalam mengakses informasi publik cukup tinggi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Semarang 2023, jumlah Generasi Z mencapai 510.695 jiwa, yang menunjukkan angka yang signifikan. Akun resmi media sosial pemerintah Kota Semarang juga sering melakukan interaksi langsung dengan warganya melalui platform media sosial yang ada. Saat ini, Kota Semarang sedang mengembangkan digitalisasi layanan publik, termasuk pemanfaatan media sosial oleh pemerintah, sehingga menciptakan konteks yang relevan untuk mengeksplorasi efektivitas komunikasi pemerintah melalui platform tersebut. Selain itu, Kota Semarang dikenal dengan keragaman budaya dan sosial yang tinggi, memberikan peluang untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi pemahaman dan partisipasi Generasi Z dalam keterbukaan informasi, serta peran media sosial dalam penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik. Media sosial dapat menjadi elemen penting dalam pengambilan keputusan di Kota Semarang untuk merespons keinginan warga terhadap berbagai isu. Dengan demikian, lokasi Semarang tidak hanya strategis tetapi juga kaya akan konteks yang relevan untuk penelitian ini, di mana peran media sosial sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Semarang.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Rendahnya Tingkat Literasi Digital oleh Generasi Z di Kota Semarang
2. Munculnya penyebaran *hoaks* dan *misinformasi* akibat kebebasan berpendapat dan mengakses informasi publik di Kota Semarang
3. Generasi Z masih banyak yang merasa bahwa mereka tidak terlibat dalam dialog dengan pemerintah, sehingga suara mereka tidak terdengar.
4. Generasi Z belum sepenuhnya memahami apa itu keterbukaan informasi publik dan hak mereka untuk mengakses informasi tersebut.
5. Generasi Z memiliki persepsi negatif terhadap media sosial sebagai alat untuk menyampaikan informasi resmi, menganggapnya kurang kredibel.

1.3. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang peneliti sampaikan pada bagian latar belakang tersebut, peneliti merumuskan masalah-masalah penelitian ini dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- 1) Bagaimana Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang?
- 2) Faktor – Faktor yang mempengaruhi Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang?

1.4. Tujuan Penelitian

Maka dari itu, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang.
2. Menganalisis Faktor – Faktor yang mempengaruhi Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini digunakan untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik terkait pemikiran akademis dalam menganalisis Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan dalam peningkatan serta perbaikan penggunaan media sosial (*Instagram* dan *Tiktok*) pada Generasi Z dalam mendukung implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Semarang.

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk menjadi dasar atas hasil dari proses pembelajaran selama perkuliahan sehingga materi yang disajikan dalam penelitian ini merupakan materi yang telah diajarkan selama perkuliahan dan diharapkan dapat menambah pengetahuan serta pengalaman dalam melakukan sebuah penelitian.

2. Bagi Instansi

Penelitian ini mampu memberikan wawasan yang lebih baik tentang pentingnya media sosial dalam konteks kebijakan keterbukaan informasi publik serta implikasinya terhadap pemerintah dan masyarakat di Kota Semarang.

1.6. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis adalah salah satu elemen penting dalam sebuah penelitian, karena berfungsi sebagai tempat untuk menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti. Menurut Arikunto (2006: 107), "Kerangka teori adalah wadah yang menjelaskan variabel atau inti permasalahan yang ada dalam penelitian." Teori-teori ini digunakan sebagai acuan untuk pembahasan berikutnya. Oleh karena itu, kerangka teoretis disusun untuk memastikan keabsahan penelitian.

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti, terdapat beberapa penelitian terkait yang relevan dan dapat dijadikan acuan untuk mendukung penelitian ini. Oleh karena itu, untuk mengembangkan kajian keilmuan maka peneliti merujuk pada penelitian-penelitian

sebelumnya sebagai bahan refrensi untuk melakukan penelitian selanjutnya. Berikut beberapa karya penelitian yang ditemukan peneliti, diantaranya adalah:

Tabel 1 . 2 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI/TAHUN/JURNAL	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Sari, W. P., Putriana, M., Wihadi, A., Firdaus, M. R., Pamungkas, B. F., Reyfaldi, R. A., ... & Bachtera, R. A. (2024). Analisis Pengaruh Terpaan Media Sosial TikTok terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2024: Pendekatan Kuantitatif. Jurnal Penelitian Inovatif, 4(3), 1255-1264.	Tujuan penelitian ini adalah Menganalisis berbagai aspek eksposur yang terjadi, termasuk jenis konten yang disajikan, interaksi antar pengguna, dan dampak politiknya.	Teori terpaan media, atau media exposure theory, menjelaskan bagaimana individu atau kelompok terpapar pada pesan-pesan yang disampaikan melalui berbagai jenis media. Teori ini berfokus pada intensitas dan frekuensi interaksi audiens dengan media, serta dampaknya terhadap perilaku dan persepsi mereka.	Penelitian menggunakan metode Kuantitatif; pengumpulan data dilakukan dengan stratified random sampling, di mana sampel diambil melalui cara acak.	Hasil penelitian ini adalah media sosial TikTok memiliki pengaruh terhadap mahasiswa sebagai pemilih pemula dalam Pemilu 2024, walaupun hasil menunjukkan pengaruh sangat lemah.
2.	Kapahang, S. E., Mingkid, E., & Kalesaran, E. R. (2020). Keterbukaan	Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi teknis penyajian	Teori Gerge C. Edward adalah Menurut	Penelitian kualitatif. Data yang terkumpul	Hasil Penelitian ini mengenai penerapan Keterbukaan

	Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Acta Diurna Komunikasi, 2(1).	keterbukaan informasi publik di Dinas Kominfo belum maksimal dan masih ada informasi yang tidak transparan, sehingga penerapan keterbukaan informasi publik belum berjalan dengan efektif.	George Edward III terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) Komunikasi, (2) Sumber daya, (3) Disposisi dan (4) Struktur Birokrasi.	adalah data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang yang menjadi narasumber dalam penelitian. Proses Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo yaitu dengan mempublikasikan informasi dan data-data yang diperlukan masyarakat di website dan di media sosial. Juga melakukan komunikasi secara langsung dengan masyarakat apabila masyarakat ingin mendapatkan suatu	Informasi Publik yang dilakukan sudah cukup baik tapi untuk publikasinya yang belum maksimal sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
--	---	--	--	---	---

				informasi yang tidak disebarluaskan.	
3.	Agus Naryoso (2019). The Role of Social Media in the Implementation of Public Information Disclosure Policy in Semarang City Jurnal International Journal of Public Administration	Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis peran media sosial dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Semarang.	Teori Difusi Inovasi (Everett M. Rogers, 1962) - Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disebarluaskan melalui saluran komunikasi tertentu dalam suatu sistem sosial.	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Media sosial memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi publik di Kota Semarang, namun masih terdapat kendala seperti kurangnya literasi digital dan akses internet yang merata.
4.	Rizki Amalia (2020). Peran Media Sosial dalam Mendukung Transparansi Informasi Publik di Kota Semarang. Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media	Menganalisis peran media sosial dalam mendukung transparansi informasi publik di Kota Semarang.	Teori Transparansi Informasi (Jeremy Bentham, 1789) - Teori ini menjelaskan pentingnya transparansi informasi dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Media sosial berperan dalam mendukung transparansi informasi publik di Kota Semarang, namun masih terdapat tantangan seperti kurangnya koordinasi antar lembaga dan kualitas konten yang belum optimal.
5.	Aditya Kurniawan (2023) J. The Role of Social Media in Promoting Public Information Disclosure Policy in Semarang City Jurnal International Journal	Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis peran media sosial dalam mempromosikan kebijakan keterbukaan	Teori Komunikasi Massa (John R. Bittner, 1989) - Teori ini menjelaskan bagaimana media massa	Penelitian kuantitatif dengan metode survey.	Media sosial berperan dalam mempromosikan kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Semarang, namun masih

	of Public Administration and Policy Research.	informasi publik di Kota Semarang.	dapat mempengaruhi opini dan perilaku masyarakat.		terdapat tantangan seperti kurangnya minat masyarakat dan keterbatasan sumber daya.
6.	Arif, D. K., Sondakh, M., & Koagouw, F. V. (2020). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik (Studi tentang penerapan UU No. 14 Tahun 2008 Di Dinas Kominfo Kota Manado). <i>Acta Diurna Komunikasi</i> , 2(4).	Penelitian yang dilakukan di Dinas Kominfo Kota Manado merujuk pada bagaimana UU ini diimplementasikan oleh Dinas Kominfo Kota Manado yang pada akhir tahun 2019 mendapatkan peringkat pertama dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik, akan tetapi masih dalam kategori menuju Informatif.	Teori Edward III. Dalam implementasi kebijakan, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Menurut Edward III (seperidikutip Awang, 2010: 44), keempat faktor tersebut dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan	Metode yang peneliti gunakan yaitu metode penelitian kualitatif, dengan pengambilan data melalui wawancara dan observasi langsung baik di kantor Dinas Kominfo Kota Manado atau di media sosial yang digunakan oleh petugas dalam menyebarkan Informasi Publik.	Hasil yang diperoleh peneliti yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Beberapa kendala yang dihadapi oleh petugas yang ada seperti dalam proses komunikasi memang sudah berjalan baik komunikasi antara pembuat kebijakan dan implementor, akan tetapi belum efektif komunikasi dengan masyarakat atau publik, selain itu juga faktor Sumber Daya yang menunjang kebijakan bisa berjalan dengan baik justru masih dirasa kurang memiliki keahlian dalam mengoperasikan fasilitas yang

					ada, karena latar belakang ilmu yang berbeda dengan tugasnya, demikian juga dengan struktur birokrasi yang dirasa masih sangat berbelit-belit, pengambilan keputusan yang kurang tegas menjadikan UU ini berjalan belum maksimal.
7.	Raja, R. L., & Buulolo, T. J. (2021). Implementasi Kinerja Uu No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pelayanan Informasi Dan Komunikasi. <i>Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik</i> , 1(2), 242-256.	Penelitian ini bertujuan untuk menggali pelayanan informasi publik bagi masyarakat.	Teori Edward III. Dalam implementasi kebijakan, terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Menurut Edward III (seperti dikutip Awang, 2010: 44), keempat faktor tersebut dapat menentukan keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan	Metode yang digunakan adalah Kualitatif. Data Penelitian diperoleh melalui Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi. Informan penelitian ini, Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika, Pegawai dan masyarakat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan informasi publik di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Toba masih kurangnya Komunikasi dalam kerja sama terutama OPD, masih tergolong sangat santai dalam memberikan kabar terbaru buat pegawai yang bekerja di bidang Informasi

					tersebut, serta para wartawan mementingkan kepentingan pribadi, sehingga pemerintah di anggap jelek terhadap masyarakat.
8.	Firman Ardiansyah (2019) .The Role of Social Media in Enhancing Public Participation in Public Information Disclosure Policy Implementation in Semarang City. Jurnal Internat ional Journal of Public Participation.	Menganalisis peran media sosial dalam meningkatkan partisipasi publik dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi di Kota Semarang.	Teori Partisipasi Publik (Sherry R. Arnstein, 1969) - Teori ini menjelaskan tingkatan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.	Media sosial berperan dalam meningkatkan partisipasi publik dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi di Kota Semarang, namun masih terdapat tantangan seperti kurangnya literasi digital dan akses internet yang terbatas.
9.	Ayu Kusumastuti, Adhi Iman Sulaiman (2021) Peran Media Sosial dalam Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Surabaya Jurnal Jurnal Ilmu Komunikasi	Tujuan Penelitian: Menganalisis peran media sosial dalam kebijakan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kota Surabaya.	Teori yang Digunakan: Teori Difusi Inovasi (Everett M. Rogers, 1962) - Teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disebarluaskan melalui saluran komunikasi tertentu dalam jangka waktu tertentu di	Metode Penelitian: Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Hasil Penelitian: Media sosial berperan penting dalam menyebarluaskan informasi publik, namun masih perlu ditingkatkan dalam hal aksesibilitas dan kualitas konten informasi.

			antara anggota sistem sosial.		
10.	Peneliti: Rahmanto Saleh, Salim Mubarok (2020) Judul Penelitian: "Peran Media Sosial dalam Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Sidoarjo" Jurnal Penelitian: Jurnal Komunikasi dan Kajian Media. Metode Penelitian: Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Tujuan Penelitian: Menganalisis peran media sosial dalam mendukung keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.	Teori yang Digunakan: Teori Keterbukaan Informasi (John Gastil, 2008) - Teori ini menekankan pentingnya keterbukaan informasi bagi masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik.	Metode Penelitian: Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus	Hasil Penelitian: Media sosial memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi publik, namun perlu peningkatan kualitas konten dan interaksi dengan masyarakat.

Sumber: diolah oleh peneliti, 2024

Pada Tabel 1.1, terlihat bahwa dalam penelitian sebelumnya, pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Sari, W. P., Putriana, M., Wihadi, A., Firdaus, M. R., Pamungkas, B. F., Reyfaldi, R. A., ... & Bachtera, R. A. (2024) dengan judul “Analisis Pengaruh Terpaan Media Sosial TikTok terhadap Partisipasi Politik Mahasiswa dalam Pemilihan Presiden Indonesia Tahun 2024” Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan pengumpulan data dilakukan dengan stratified random sampling, di mana sampel diambil melalui cara acak. Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis berbagai aspek eksposur yang terjadi, termasuk jenis konten yang

disajikan, interaksi antar pengguna, dan dampak politiknya. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial TikTok memiliki pengaruh terhadap mahasiswa sebagai pemilih pemula dalam Pemilu 2024, walaupun hasil menunjukkan pengaruh sangat lemah.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Kapahang, S. E., Mingkid, E., & Kalesaran, E. R. (2020) berjudul “Keterbukaan Informasi Publik Pada Dinas Kominfo Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.” Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan dari narasumber penelitian. Proses Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Kominfo mencakup publikasi informasi dan data yang diperlukan masyarakat di website dan media sosial, serta melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat jika mereka ingin mendapatkan informasi yang tidak dipublikasikan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan Keterbukaan Informasi Publik, yang dinilai sudah cukup baik, tetapi publikasinya belum optimal, sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang diperlukan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori George C. Edward III yang menyebutkan ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi.

1.6.2. Pengertian Administrasi Publik

Menurut Anggara (2016): 13, kata “administrasi” berasal dari kata Latin (Yunani) “ad” dan “ministrate”, yang berarti “melayani” dan dapat bermakna melayani sekaligus memenuhi. Menurut Nigro & Nigro (dalam Anggara, 2016:46), administrasi publik adalah suatu jenis pekerjaan yang dilakukan dalam lingkungan publik yang terdiri dari tiga cabang:

legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yeremias T. Keban (2014: 4) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “administrasi publik” adalah fungsi pemerintah yang diberi wewenang dan wajib merancang berbagai bentuk tindakan terobosan untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Keban (2014): 4, masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang wajib tunduk, taat, dan menaati segala peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan pemerintah. Administrasi publik merupakan upaya pengelolaan sumber daya yang terstruktur dan berdasarkan koordinasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, menurut Chandler dan Plano (dalam Keban, 2014: 3). Penciptaan, pelaksanaan, dan pengelolaan seluruh kebijakan publik mencakup bentuk koordinasi itu sendiri. Kedua penulis tersebut menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan suatu seni dan ilmu yang berguna dalam mengatur segala jenis kebijakan publik dan melaksanakan tugas yang diberikan. Tujuan administrasi publik adalah untuk memecahkan masalah guna meningkatkan sumber daya organisasi, manusia, dan keuangan. Kebijakan publik mencakup pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh lembaga legislatif, keputusan-keputusan yang dibuat oleh presiden, penggunaan anggaran, dan segala tindakan yang diambil oleh siapapun yang menjadikan masyarakat sebagai fokus utamanya (Samodra Wibawa, 1994: 50).

1.6.3. Paradigma Administrasi Publik

Perkembangan suatu disiplin ilmu dapat ditelusuri dari perubahan atau pergeseran paradigmanya. Paradigma adalah cara pandang, nilai, teknik, prinsip, atau pendekatan dalam memecahkan suatu masalah yang dianut oleh komunitas ilmiah pada waktu tertentu, menurut Kuhn (lihat Keban, 2014). Ketika suatu paradigma berada dalam krisis, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap paradigma tersebut dan mulai mencari perspektif baru

yang lebih sesuai dengan keadaan yang ada. Perspektif lama telah digantikan dengan perspektif baru akibat adanya keterkaitan antara krisis ini dengan kemajuan ilmu administrasi publik. Berikut ini justifikasi berkembangnya enam paradigma dalam manajemen publik.

Paradigma dikotomi politik dan administratif dinamai Paradigma 1 (1900–1926). Protagonis dari paradigma ini adalah Leonard D. White dan J. Goodnow. Paradigma ini hanya menonjolkan bagian lokusnya yaitu birokrasi pemerintahan, namun tidak mencakup secara rinci atau rinci fokus atau strategi yang harus ditetapkan dalam administrasi publik.

Paradigma Prinsip Administrasi merupakan paradigma 2 yang berlangsung pada tahun 1927–1937. Perwakilan terkenal dari paradigma 2 adalah Willoughby, Gullick, dan Urwick, yang ide-idenya sangat dipengaruhi oleh Taylor dan tokoh-tokoh manajemen klasik lainnya seperti Fayol. Dengan fokus pada administrasi publik, mereka mengusulkan prinsip-prinsip administrasi. Gagasan ini bersifat universal dan dituangkan dalam pengertian POSDCORB (Perencanaan, Pengorganisasian, Penempatan Staf, Pengarahan, Koordinasi, Pelaporan dan Penganggaran).

Paradigma administrasi negara sebagai ilmu politik dikenal dengan Paradigma 3 (1950–1970). Morstein-Marx, salah satu pendukung paradigma ketiga ini, berpendapat bahwa memisahkan politik dari administrasi adalah hal yang mustahil atau tidak masuk akal. Herbert Simon melanjutkan dengan mengatakan bahwa meskipun ide-ide administratif ini mungkin tidak dapat diterapkan secara universal, namun administrasi negara akan dapat diterapkan. Birokrasi pemerintah adalah titik fokus dari pandangan dunia ini. Karena ilmu politik dianggap mendominasi bidang administrasi publik, maka patut digarisbawahi bahwa

administrasi publik saat ini sedang mengalami krisis identitas. Konsep administrasi publik sebagai ilmu administrasi dimulai pada tahun 1956–1970. Paradigma 4 melanjutkan pengembangan ilmiah dan mendalam dari prinsip-prinsip manajemen yang sebelumnya populer. Paradigma ini berfokus pada perilaku organisasi, analisis manajemen, dan penggunaan teknologi kontemporer seperti metodologi kuantitatif, analisis sistem, riset operasi, dan sebagainya. Paradigma administrasi publik sebagai administrasi publik adalah Paradigma 5 (1970–sekarang). Paradigma ini memiliki titik konsentrasi yang sangat berbeda. Lokusnya adalah permasalahan dan kepentingan publik, sedangkan fokusnya adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan publik.

Paradigma Governance merupakan paradigma 6 yang dimulai sejak tahun 1990 hingga saat ini. Paradigma ini mewakili fase terkini dalam pertumbuhan ilmu administrasi publik. Pengelolaan beragam urusan ekonomi, sosial, dan politik melalui interaksi atau kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dikenal dengan istilah tata kelola (Keban, 2014). Tata kelola adalah suatu sistem prinsip, kebijakan, dan institusi. Paradigma ini mengutamakan prosedur dan sistem yang memungkinkan masyarakat dan kelompok untuk mengekspresikan tujuan mereka, menyelesaikan konflik yang muncul, dan melaksanakan kewajiban hukum dan moral mereka. Pemerintah diharapkan dapat menciptakan iklim politik dan hukum yang mendukung dalam situasi ini, sektor swasta diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan uang, serta masyarakat dapat menyelenggarakan lingkungan sosial yang sehat. Paradigma keenam, kadang-kadang dikenal sebagai paradigma tata kelola, mencakup penelitian ini. Paradigma ini mencakup tanggung jawab yang dibebankan pada pemerintah untuk menjamin masyarakat menerima

pelayanan publik yang berkualitas guna memuaskan warganya. Menghubungkan teori paradigma administrasi publik keenam, yaitu governance, dengan fenomena permasalahan seksual dalam konteks judul skripsi "Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang" memerlukan pemahaman yang mendalam tentang interaksi antara media sosial, generasi muda, dan kebijakan publik. Paradigma governance menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menciptakan kebijakan yang responsif dan akuntabel. Dalam hal ini, media sosial berfungsi sebagai platform yang memungkinkan Generasi Z untuk berpartisipasi aktif dalam dialog publik, menyuarakan pendapat mereka, serta mengakses informasi mengenai kebijakan keterbukaan informasi publik.

Keterlibatan aktif Generasi Z di platform seperti Instagram dan TikTok dapat dilihat sebagai bentuk partisipasi masyarakat yang sejalan dengan prinsip-prinsip governance, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam proses pembuatan kebijakan. Melalui media sosial, generasi ini tidak hanya menerima informasi tetapi juga berperan sebagai agen perubahan yang mampu mempengaruhi opini publik dan mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, fenomena permasalahan yang sering muncul di media sosial juga mencerminkan tantangan bagi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang inklusif dan sensitif terhadap isu-isu sosial.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana terpaan media sosial pada Generasi Z terhadap kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota

Semarang. Dengan pendekatan governance, penelitian ini akan menganalisis bagaimana interaksi antara pengguna media sosial dan kebijakan publik dapat menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka dan demokratis. Melalui pemahaman ini, diharapkan akan ada sinergi antara kebijakan publik dan partisipasi masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memenuhi harapan generasi muda dalam era digital saat ini.

1.6.4. Terpaan Media

Terpaan media memuat informasi yang menunjukkan seberapa sering informasi relevan yang ada dalam pesan pada audiens yang ditargetkan. Peran keterbukaan informasi cukup untuk mengisi kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hal-hal yang disosialisasikan. Berkaitan dengan itu perlu memperhatikan media komunikasi yang digunakan, menyesuaikan isi, frekuensi dan format dengan kapasitas masyarakat penerima (Rakhmat, 2007). Menurut Siregar dalam Dadan Mulyana (2002), salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan sosial adalah penyebaran informasi, termasuk melalui media massa. Oleh karena itu, peran media massa menjadi penting dalam mengubah respon publik.

Terpaan media adalah perilaku seseorang (audiens) ketika menggunakan media. Terpaan media didefinisikan sebagai paparan audiens terhadap isi pesan di media atau bagaimana media mempengaruhi audiens McQuail (dalam Severin & Tankard, 2011). Penggunaan media mencakup jumlah waktu yang dihabiskan di berbagai media, jenis konten media yang dikonsumsi, dan berbagai hubungan yang dimiliki konsumen individu dengan konten media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan.

Terpaan melalui media baru adalah situasi di mana khalayak dihadapkan pada informasi melalui media baru, juga dikenal sebagai komunikasi massa karena potensinya untuk menjangkau khalayak global melalui koneksi web dan internet. Karena inovasi teknologi, media baru muncul. Media baru bersifat multiarah, dan media baru mendorong dan bahkan memasukkan tanggapan dalam berbagai bentuk dan isi. Media baru, media komunikasi, mengacu pada konten yang dapat diakses kapan saja, di mana saja, pada perangkat digital apa pun, dan memiliki kemampuan untuk berinteraksi antara penyedia informasi dan penerima informasi, serta memungkinkan semua pihak untuk berpartisipasi secara kreatif.

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teori terpaan media yang dinyatakan oleh Karl E. Rosengren yang menjelaskan bahwa Teori Terpaan media menjelaskan penggunaan media dari berapa lama waktu yang digunakan, media yang dikonsumsi dan jenis isi media secara keseluruhan. Menurut Jalaludin Rakhmat Media Exposure diartikan sebagai terpaan media (Rakhmat, 2003). (Ardianato & Erdinaya, 2007) (dalam Tusan, Hadi, & Budiana, 2019) mengatakan terpaan media berupaya mencari data khalayak baik mengenai penggunaan media, frekuensi penggunaan, jenis media maupun durasi penggunaan. Larry Shore mendefinisikan terpaan media Dalam Mass Media For Development And Examination Of Access, Exposure And Impact yaitu (Kriyantono, 2006, hal. 208):

“Media exposure is more complicated than access because its deal not only white whether a person is actually range of the particular mass media, but also wheter a person is atually expose to the message. Expose is hearing, seeing, reading or more generally experiencing with the least a minimal amount of interest the media message”

Definisi di atas menekankan bahwa seseorang yang hanya berpartisipasi dalam lingkungan fisik tidak dapat dikatakan mengekspose media. Terpaan media atau media exposure akan ada ketika khalayak benar – benar menerima pesan yang diberikan media. Bentuk aktual dari terpaan media adalah mendengar, melihat, menonton, membaca atau ikut membaurkan diri (*experiencing*) dengan isi media. Ketika mendengar, membaca pesan merupakan wujud nyata dari terpaan media, jelas bahwa terpaan media adalah perilaku individu saat menggunakan media tersebut. Dengan kata lain dalam bukunya Shore melihat bahwa media exposure sebagai perilaku komunikasi.

Sejalan dengan Rosengren (dalam Rakhmat J. , 2003) terpaan media dinilai sebagai penggunaan media ini termasuk waktu yang dihabiskan di media yang berbeda, jenis konten media yang dikonsumsi, dan berbagai hubungan antara konsumen individu dan konten media yang dikonsumsi atau dengan media secara keseluruhan. Penerima pesan akan mendapatkan terpaan media apabila dipengaruhi faktor atau tujuan tertentu. Selain itu Blumer dan Katz (dalam Rakhmat, 2012) merumuskan beberapa asumsi dasar dalam teori ini yaitu:

1. Keaktifan khalayak merupakan elemen penting dalam media masa yang kemudian dijadikan sebagai tujuan.
2. Adanya inisiasi massa dalam proses komunikasi yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan.
3. Adanya persaingan media massa dengan sumber yang lainnya dalam memenuhi kepuasan kebutuhan pengguna.

4. Pengguna memahami dalam pelaporan kepentingan tertentu dalam artian banyaknya arah tujuan pengguna yang dapat disimpulkan dari data di media.
5. Orientasi khalayak harus dipahami dahulu untuk menilai segi kulturalnya.

Teori Media Exposure atau teori terpaan media berbicara tentang khalayak ketika menggunakan media, baik jenis media, frekuensi penggunaan, maupun durasi penggunaan. Jenis media yang digunakan antara lain media audio, media audiovisual, media cetak, atau gabungan dari beberapa media (Ardianato & Erdinaya, 2007). Menurut Rosengren (dalam Rizki & Pangestuti, 2017) terpaan media bisa diukur melalui aspek aspek seperti berikut:

1. Frekuensi adalah gambaran seberapa sering individu mengakses media untuk tujuan yang berbedaa. Frekuensi penggunaan dinyatakan dalam periode waktu tertentu seperti per bulan, per minggu, atau per hari.
2. Durasi adalah gambaran yang digunakan untuk mengukur individu mengakses media untuk tujuan yang berbeda. Durasi penggunaan dinyatakan dalam periode waktu tertentu seperti per jam atau per menit.
3. Atensi (Perhatian) adalah tingkat perhatian individu terhadap penggunaan media dan mengkonsumsi pesan dari media. Atensi merupakan tingkat suatu ketekenunan atau ketertarikan seseorang terhadap aktivitas yang diminati dalam penggunaan media dan mengkonsumsi pesan dari media.

Dengan adanya terpaan media ini, isi pesan suatu media mampu untuk menerpa audiens dimana hasil dari terpaan isi media tersebut menghasilkan tindakan tertentu. Untuk penelitian ini isi pesan media yang terkandung dalam berita seputar informasi

kebijakan keterbukaan informasi publik di akun Instagram @semarangpemkot dan Tiktok @semarangpemkot. Apabila isi pesan media tersebut mampu untuk membuat pengetahuan audiens (*followers*) mengenai keterbukaan informasi publik maka dianggap dapat mempengaruhi audiens secara positif telah diterpa oleh isi pesan media. Fenomena sosial yang akan dibahas dalam penelitian secara keseluruhan akan memaparkan bagaimana peranan terpaan media sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Semarang. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat terungkap hubungan antara penggunaan media sosial dan efektivitas penyampaian informasi publik kepada generasi muda, serta bagaimana hal ini berkontribusi terhadap pemahaman dan partisipasi mereka dalam kebijakan publik.

1.6.5. Kebijakan Publik

Samodra Wibawa (1994:50) mengartikan kebijakan sebagai suatu sistem dengan tiga bagian yang saling berinteraksi satu sama lain. Aktor kebijakan, kebijakan lingkungan, dan kebijakan publik aktual merupakan tiga bagian. Ketiga komponen ini bekerja sama. Penjelasan mendalam mengenai komponen-komponen tersebut antara lain sebagai berikut: Aktor dalam kebijakan masyarakat meliputi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga pemerintah. Suatu kebijakan bisa saja dipengaruhi dan dipengaruhi oleh sejumlah variabel. Kebijakan lingkungan hidup mengacu pada aspek kemasyarakatan yang dapat atau harus diubah oleh aktor kebijakan, bukan individu atau organisasi yang tunduk pada kewenangan dan kendali pemerintah sebagai penentu akhir kebijakan (yang semuanya masuk dalam kotak aktor/aktor kebijakan) Kebijakan publik merupakan kumpulan alternatif

tindakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan (atau mencari solusi terhadap hambatan) dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Menurut Bridgman dan Davis (2005) dalam Edi Suharto (2007:3), kebijakan publik umumnya diartikan sebagai 'apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan'. Dengan kata lain, kebijakan publik mencakup 'hal-hal yang dipilih oleh pemerintah untuk diimplementasikan atau diabaikan'. Sementara itu, menurut Hogwood dan Gunn (1990) dalam Edi Suharto (2007:4), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Namun, ini tidak berarti bahwa konsep 'kebijakan' hanya dimiliki atau didominasi oleh pemerintah. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial (misalnya Karang Taruna dan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK), serta lembaga sukarela lainnya juga memiliki kebijakan-kebijakan mereka sendiri.

Menurut Bridgeman dan Davis (2004) dalam Edi Suharto (2007:5), kebijakan publik memiliki setidaknya tiga dimensi yang saling terkait, yaitu sebagai tujuan (objective), sebagai pilihan tindakan yang sah secara hukum (authoritative choice), dan sebagai hipotesis (hypothesis).

1. Kebijakan publik sebagai tujuan

Kebijakan publik pada dasarnya berkaitan dengan pencapaian kepentingan masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan pemerintah yang dirancang untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan oleh masyarakat sebagai konstituen pemerintah.

2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan bersifat legal atau otoritatif karena dihasilkan oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Keputusan ini mengikat pegawai negeri untuk bertindak atau mengarahkan tindakan, seperti menyiapkan rancangan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dipertimbangkan oleh parlemen, atau mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan program tertentu.

3. Kebijakan publik sebagai hipotesis

Kebijakan dibuat berdasarkan teori, model, atau hipotesis mengenai hubungan sebab dan akibat. Kebijakan selalu didasarkan pada asumsi mengenai perilaku. Kebijakan mencakup insentif yang mendorong individu untuk bertindak, serta disinsentif yang mendorong mereka untuk tidak bertindak. Kebijakan harus mampu menyatukan prediksi mengenai keberhasilan yang ingin dicapai dan mekanisme untuk mengatasi kemungkinan kegagalan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, beberapa karakteristik utama dari kebijakan publik dapat disimpulkan. Pertama, perhatian utama kebijakan publik adalah tindakan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu, bukan perilaku yang acak atau berubah-ubah. Kedua, kebijakan publik mencakup pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, bukan sekadar keputusan yang terpisah. Ketiga, kebijakan publik adalah apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau menyediakan perumahan rakyat, bukan hanya apa yang direncanakan untuk dilakukan. Keempat, kebijakan publik dapat bersifat positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan

melibatkan tindakan jelas dari pemerintah untuk menangani suatu masalah, sedangkan secara negatif, kebijakan bisa mencakup keputusan pemerintah untuk tidak melakukan tindakan yang diperlukan dalam konteks tertentu. Kelima, kebijakan publik setidaknya bersifat positif, didasarkan pada hukum, dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

1.6.6. Implementasi Kebijakan

Proses pengelolaan input untuk mencapai output atau outcome bagi masyarakat dikenal dengan istilah implementasi kebijakan. Hal ini merupakan kegiatan nyata yang mengikuti publikasi arah kebijakan yang baik. Tahapan pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan dapat digabungkan dan dipisahkan. Di satu sisi, pembentukan kebijakan merupakan proses bottom-up, artinya dimulai dengan representasi ambisi, permintaan, atau dukungan masyarakat. Di sisi lain, implementasi kebijakan mengikuti logika top-down yang mengurangi kemungkinan kebijakan abstrak atau makro menjadi tindakan spesifik atau mikro. Agar kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil tindakan pemerintah, maka kemitraan harus terjalin. Inisiatif-inisiatif ini diciptakan dengan antisipasi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sasaran dan sasaran kebijakan diubah menjadi program yang berupaya menghasilkan hasil yang diinginkan.

Implementasi kebijakan menurut Wibawa (dalam Hessel dkk., 2008: 7) adalah proses pelaksanaan keputusan mengenai kebijakan penting yang biasanya dituangkan dalam undang-undang tetapi dapat juga berbentuk perintah eksekutif atau keputusan legislatif yang signifikan. Sejumlah faktor, seperti kekhawatiran para pengambil kebijakan, tingginya konsistensi komitmen pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran, sangat berkaitan dengan keberhasilan implementasi kebijakan. Secara konseptual, mewujudkan suatu kebijakan

berarti mengumpulkan sumber daya alam, manusia, dan keuangan, diikuti dengan mencari tahu langkah-langkah apa yang harus diambil untuk mewujudkan tujuan kebijakan tersebut. Menurut George C. Edwards III, ada empat variabel teoritis yang mempengaruhi bagaimana kebijakan diimplementasikan: (1) komunikasi; (2) sumber daya; (3) disposisi; dan (4) struktur birokrasi (Riant Nugroho, 2009: 636). Keempat faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain.

1.6.7. Faktor Implementasi Kebijakan menurut George C. Edwards III

A. Komunikasi

Dalam konteks ini, komunikasi mengacu pada prosedur yang digunakan pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Seseorang, kelompok, atau organisasi menggunakan komunikasi sebagai metode atau aktivitas untuk menyebarkan pengetahuan antar orang lain atau dalam suatu komunitas. Gagasan komunikasi mencakup ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, struktur organisasi untuk melaksanakannya, dan bagaimana kebijakan tersebut disampaikan kepada organisasi dan/atau masyarakat luas. Transmisi : Hal ini menandakan sering terjadi kesalahpahaman (miskomunikasi) dalam komunikasi. Hal ini sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa komunikasi telah melalui berbagai tingkat birokrasi, sehingga menyebabkan ekspektasi berubah seiring berjalannya waktu. Kejelasan: Informasi yang diberikan kepada pelaksana kebijakan harus dapat dimengerti dan bebas dari ambiguitas. Konsistensi: Untuk diikuti atau diterapkan, instruksi komunikasi harus konsisten dan jelas. Karena mungkin akan membingungkan pelaksana di lapangan jika perintah tersebut sering diberikan.

B. Sumberdaya

Komponen penerapan yang krusial bagi pencapaian kebijakan melibatkan pemanfaatan sumber daya. Karena implementasi kebijakan tidak akan berhasil jika tidak ditangani oleh individu-individu yang ahli dan relevan dengan fungsinya, maka diperlukan sejumlah staf yang berpengalaman dan relevan dalam jumlah yang mampu. Sumber daya sangat penting untuk menerapkan kebijakan yang lebih baik. Sumber daya merupakan alat yang dapat digunakan untuk membantu implementasi kebijakan dalam penelitian ini.

C. Disposisi

Agar kebijakan berhasil diimplementasikan, tidak boleh ada perbedaan pendapat antara pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan serta harus ada hubungan yang mendukung antara keduanya. Kemampuan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan secara efektif mengharuskan para pelaksana kebijakan tidak hanya memahami apa yang harus mereka lakukan namun juga mempunyai motivasi untuk melakukannya. Ini dikenal sebagai disposisi. Disposisi berkaitan dengan seberapa besar keinginan organisasi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan publik. Tanpa komitmen dan kemauan untuk melaksanakan kebijakan, keterampilan saja tidaklah cukup. Pertimbangan penting untuk variabel disposisi meliputi:

1. Penunjukan birokrat: Dalam artian individu-individu yang mempunyai komitmen terhadap kebijakan yang dikembangkan, terutama untuk kepentingan warga negara, harus dipilih dan diangkat sebagai pegawai pelaksana kebijakan.

2. Insentif: dalam arti mengubah insentif dengan meningkatkan sejumlah manfaat atau biaya, yang mungkin berfungsi sebagai motivator bagi pelaksana kebijakan untuk mengikuti instruksi. Dalam upaya mencapai tujuan pribadi atau organisasi, hal ini dilakukan.

D. Struktur birokrasi

Mengenai kecukupan organisasi birokrasi yang mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan publik. Bagaimana mencegah fragmentasi birokrasi menjadi tantangan karena struktur ini membuat proses implementasi menjadi tidak efektif. meskipun faktor-faktor lain dalam implementasi kebijakan telah terpenuhi dengan baik. Namun karena struktur administrasi yang buruk. Beberapa orang harus bekerja sama untuk menerapkan kebijakan yang kompleks. Ketika struktur kebijakan tidak sesuai dengan pilihan yang ada, maka kebijakan tersebut akan terhambat. Birokrasi yang menjalankan kebijakan harus mampu mendukung mereka yang terpilih secara politik dengan bekerja sama secara baik. Kerangka birokrasi yang mendukung implementasi kebijakan sangatlah penting; jika tidak, implementasi kebijakan tersebut tidak akan seefektif yang seharusnya. Struktur birokrasi berupa koordinasi yang efektif antara lembaga-lembaga terkait saat menegakkan suatu kebijakan, serta tugas-tugas manajemen mulai dari pembuatan kebijakan hingga pelaksana di lapangan.

1.6.8. Kerangka Berpikir

Dalam konteks Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota

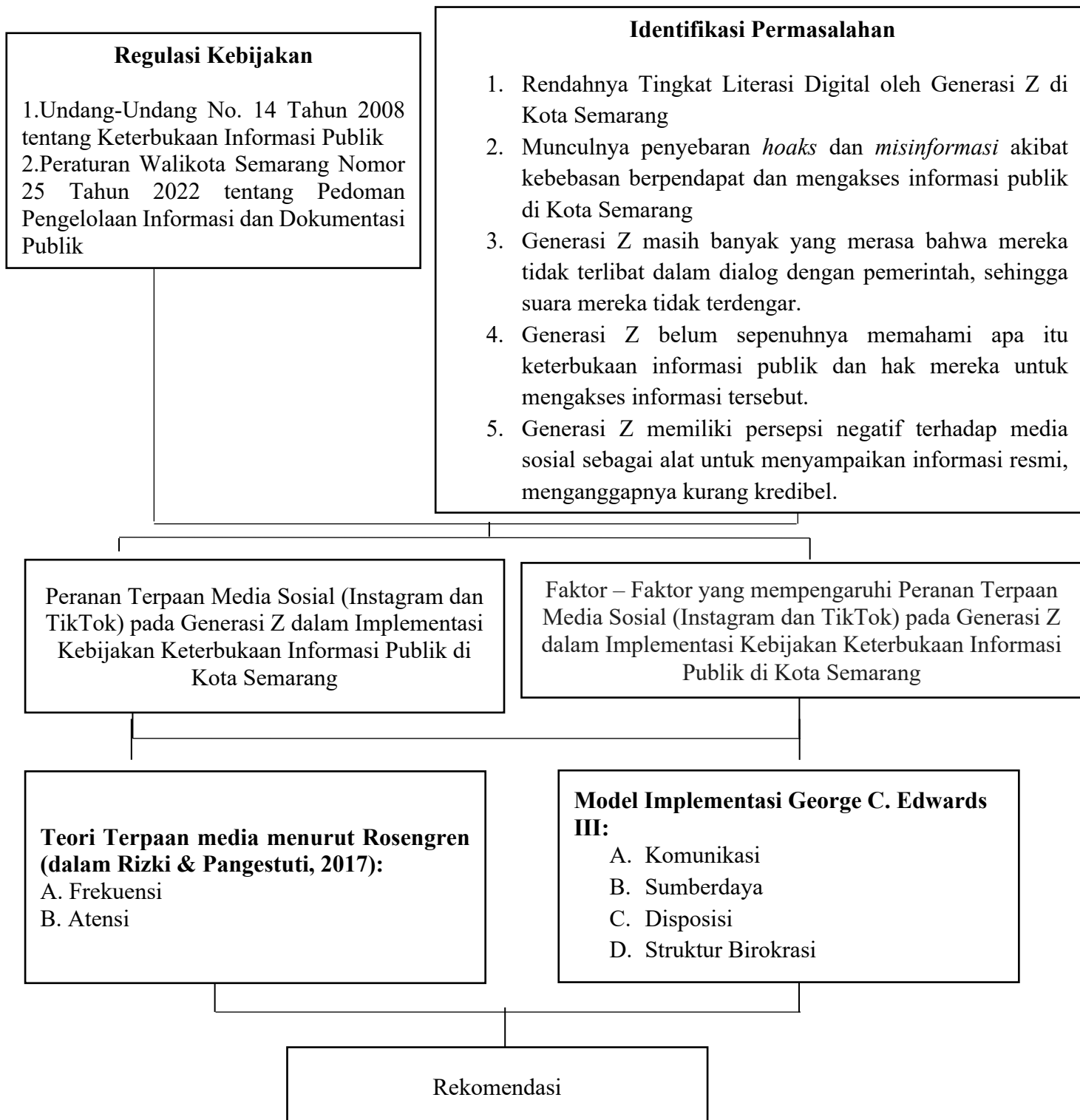
Semarang. Pertama, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan Generasi Z menjadi tantangan utama dalam memahami dan memanfaatkan informasi yang tersedia secara online. Hal ini berkontribusi pada penyebaran hoaks dan misinformasi, yang sering kali muncul akibat kebebasan berpendapat dan akses informasi publik yang tidak diimbangi dengan pemahaman kritis. Selanjutnya, banyak anggota Generasi Z merasakan ketidaklibatan dalam dialog dengan pemerintah, sehingga suara mereka tidak terdengar dalam proses pengambilan keputusan. Ketidapahaman mengenai konsep keterbukaan informasi publik dan hak mereka untuk mengakses informasi ini menghambat partisipasi aktif mereka. Selain itu, generasi ini cenderung memiliki persepsi negatif terhadap media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan informasi resmi, sering kali menganggapnya kurang kredibel dibandingkan sumber informasi lainnya.

Dengan mengidentifikasi permasalahan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana akun resmi media sosial, seperti Instagram dan TikTok, dapat berfungsi sebagai jembatan untuk meningkatkan literasi digital, memperkuat keterlibatan Generasi Z, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak mereka dalam konteks keterbukaan informasi publik. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan strategi yang efektif untuk memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi yang kredibel dan inklusif dalam upaya membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan Generasi Z.

Kurangnya peranan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada 30 April 2008 juga menjadi tantangan. Undang-

undang ini mengharuskan setiap badan publik untuk menyediakan informasi publik, kecuali untuk beberapa informasi yang dianggap rahasia negara sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah, penelitian ini bertujuan untuk mendalami implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik serta peran media sosial pemerintah kota. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah menjadikan media sosial sebagai elemen penting dalam pengambilan kebijakan di Kota Semarang, merespons keinginan warga terhadap berbagai isu, dan membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat melalui penyampaian informasi yang akurat secara kreatif dan inovatif. Penelitian ini akan menggunakan teori terpaan media Rosengren dan implementasi kebijakan George Edward III untuk menganalisis hubungan antara penggunaan media sosial dan efektivitas kebijakan keterbukaan informasi publik di kalangan Generasi Z.

Gambar 1.5 Kerangka Pikir Penelitian



Sumber: *Diskominfo Kota Semarang, Teori Terpaan media menurut Rosengren (dalam Rizki & Pangestuti, 2017), Teori Implementasi Kebijakan menurut George C. Edwards III (1980), dan diolah oleh penulis.*

1.7. Operasionalisasi Konsep

Suatu proses untuk menerjemahkan konsep abstrak menjadi konsep yang dapat diamati dan diinterpretasikan secara kualitatif. Proses ini penting dilakukan dalam penelitian kualitatif, karena memungkinkan peneliti untuk memahami konsep-konsep tersebut secara mendalam dan menyeluruh. Isi-isi dari operasional konsep dari permasalahan Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang.

1.7.1. Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang

Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang mencerminkan keterhubungan antara generasi muda dengan teknologi digital serta tantangan dalam memahami hak-hak mereka sebagai warga negara. Generasi Z, yang merupakan kelompok usia yang sangat akrab dengan perangkat digital, cenderung menggunakan media sosial sebagai sumber utama informasi. Namun, meskipun mereka aktif dalam menggunakan platform-platform ini, pemahaman mereka tentang keterbukaan informasi publik masih perlu ditingkatkan. Pemerintah Kota Semarang telah berupaya memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan publik dan

hak akses informasi. Namun, meskipun aksesibilitas meningkat, banyak anggota Generasi Z yang belum sepenuhnya memahami pentingnya keterbukaan informasi sebagai alat untuk mengawasi kebijakan pemerintah dan memastikan transparansi. Berdasarkan Teori Terpaan media menurut Rosengren (dalam Rizki & Pangestuti, 2017) terpaan media bisa diukur melalui aspek aspek seperti berikut:

1. Frekuensi adalah gambaran seberapa sering individu mengakses media untuk tujuan yang berbedaa. Aspek ini akan diukur dengan menganalisis seberapa sering individu dari Generasi Z mengakses media sosial untuk tujuan mendapatkan kejelasan suatu informasi terkait kebijakan keterbukaan informasi publik, keterlibatan dan pasrtisipasi aktifnya.
2. Atensi (Perhatian) adalah tingkat perhatian individu terhadap penggunaan media dan mengkomsumsi pesan dari media. Atensi merupakan tingkat suatu ketekenunan atau ketertarikan seseorang terhadap aktivitas yang diminati dalam penggunaan media dan mengkomsumsi pesan dari media. Hal ini mencakup seberapa besar fokus mereka saat mengonsumsi pesan dari akun resmi pemerintah.

Dengan elemen-elemen ini, media sosial berperan penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan publik. Lebih lanjut, media sosial juga dapat berperan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak mereka atas informasi publik. Melalui konten-konten yang menarik dan mudah dipahami, pemerintah

dapat mengedukasi warga tentang pentingnya keterbukaan informasi dan bagaimana mereka dapat mengaksesnya. Selain itu, media sosial juga dapat menjadi sarana bagi pemerintah Kota Semarang untuk membangun kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti organisasi masyarakat sipil, media, akademisi, dan sektor swasta. Melalui platform media sosial, pemerintah dapat berbagi informasi, mengundang partisipasi, serta mengkoordinasikan upaya-upaya bersama dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang lebih efektif.

1.7.2. Faktor – Faktor yang mempengaruhi Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang

Memanfaatkan media sosial secara efektif, pemerintah tidak hanya dapat meningkatkan aksesibilitas informasi tetapi juga membangun kepercayaan publik. Kejelasan dan keterpahaman informasi yang disampaikan melalui akun resmi dapat membantu mengurangi dampak negatif dari misinformasi dan hoax, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan. Sehingga untuk menjawab Faktor – factor yang mempengaruhi peran akun media sosial (Instagram dan TikTok) Pemerintah Kota Semarang pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik perlu beberapa dimensi yaitu:

1. Komunikasi. Faktor komunikasi terkait dengan bagaimana pemerintah Kota Semarang menyampaikan dan mendiseminasikan informasi publik melalui media sosial. Hal ini mencakup kejelasan pesan, konsistensi penyampaian, serta

ketepatan sasaran komunikasi. Pemerintah harus mampu mengomunikasikan kebijakan keterbukaan informasi publik secara efektif melalui platform media sosial yang digunakan, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka terkait akses informasi.

2. Sumber daya. Faktor sumber daya berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas sumber daya yang mendukung implementasi kebijakan melalui media sosial. Ini mencakup sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan fasilitas pendukung. Pemerintah Kota Semarang harus memastikan bahwa petugas yang mengelola media sosial memiliki kompetensi yang memadai, didukung dengan anggaran yang cukup untuk pengembangan dan pemeliharaan platform media sosial, serta tersedianya infrastruktur teknologi yang andal.
3. Disposisi. Faktor disposisi merujuk pada sikap dan komitmen dari para pelaksana kebijakan, dalam hal ini pemerintah Kota Semarang. Hal ini mencakup pemahaman yang jelas terhadap tujuan dan manfaat kebijakan keterbukaan informasi publik, serta motivasi yang kuat untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk mewujudkannya. Disposisi yang positif dari pemerintah akan mendorong upaya yang sungguh-sungguh dalam mengoptimalkan peran media sosial.
4. Struktur birokrasi. Faktor struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme dan prosedur yang mengatur penggunaan media sosial dalam implementasi kebijakan. Pemerintah Kota Semarang perlu memiliki panduan atau standard operating procedure yang jelas terkait pemanfaatan media sosial, pembagian tugas dan

tanggung jawab, serta koordinasi antar-unit kerja terkait. Struktur birokrasi yang terorganisir dengan baik akan mendukung kelancaran dan kesinambungan implementasi kebijakan melalui media sosial.

Keempat faktor tersebut saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Misalnya, komunikasi yang efektif melalui media sosial membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, disposisi yang positif dari pemerintah, serta struktur birokrasi yang jelas. Sebaliknya, struktur birokrasi yang kaku dapat menghambat komunikasi dan fleksibilitas dalam pemanfaatan media sosial untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, pemerintah Kota Semarang perlu memperhatikan dan mengelola keempat faktor tersebut secara komprehensif agar dapat mengoptimalkan peran media sosial dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik. Dengan memahami dan mengelola faktor-faktor ini, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan efektivitas keterbukaan informasi publik di Kota Semarang melalui pemanfaatan media sosial.

\

Tabel 1 . 3 Operasioanalisis Konsep

Fenomena Penelitian	Dimensi	Aspek yang diamati
Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang	Frekuensi	1. Kejelasan dan Keterpahaman: Tinjau apakah pesan yang disampaikan terkait keterbukaan informasi publik jelas dan mudah dipahami oleh Generasi Z. 2. Keterlibatan dan Partisipasi Aktif: Analisis tingkat keterlibatan Generasi Z dengan konten yang diposting, seperti jumlah like, komentar, dan share. Ini dapat memberikan indikasi seberapa efektif komunikasi tersebut.
	Atensi	1. Perubahan Sikap: Mengamati apakah terdapat perubahan sikap atau perilaku

		di kalangan Generasi Z terkait keterbukaan informasi setelah terpapar konten dari akun resmi pemerintah.
Faktor – Faktor yang mempengaruhi Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang	Komunikasi	1. Saluran Komunikasi dengan Platform Media Sosial: Analisis bagaimana Instagram dan TikTok digunakan sebagai saluran untuk menyampaikan informasi oleh pemerintah. Apakah konten yang disajikan menarik dan mudah diakses oleh Generasi Z. 2. Konsistensi Konten: Frekuensi dan konsistensi dalam mengunggah konten yang berkaitan dengan

		kebijakan keterbukaan informasi publik. 3. Diversifikasi Konten: Penyajian konten dalam berbagai format (gambar, video, infografis) untuk menarik perhatian Generasi Z yang lebih menyukai konten visual.
	Sumber daya	1. Keterampilan dan Kompetensi: Meninjau sejauh mana staf pemerintah yang mengelola akun media sosial memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai tentang keterbukaan informasi publik serta kemampuan untuk

		menyampaikan informasi dengan efektif kepada Generasi Z. 2. Pelatihan dan Pengembangan: Evaluasi apakah ada program pelatihan yang disediakan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan literasi digital bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan media sosial. 3. Kolaborasi dengan Pihak Ketiga: Pertimbangkan apakah pemerintah menjalin kemitraan dengan organisasi non-pemerintah, akademisi, atau influencer untuk meningkatkan penyebaran
--	--	---

		informasi mengenai keterbukaan publik. 4. Sumber Teknologi: Ketersediaan Teknologi untuk pemanfaatan platform digital untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik, khususnya bagi Generasi Z 5. Sumber Anggaran: Ketersediaan anggaran untuk kampanye promosi di media sosial, termasuk iklan berbayar untuk menjangkau audiens yang lebih luas, serta pengembangan tim.
	Disposisi	1. Sikap Pelaksana Kebijakan: Komitmen dan sikap positif dari pelaksana kebijakan di Pemerintah Kota Semarang terhadap

		pentingnya keterbukaan informasi publik. Disposisi ini akan mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan masyarakat di media sosial. 2. Responsivitas: Tingkat responsivitas pemerintah terhadap pertanyaan atau keluhan dari Generasi Z di media sosial. Apakah mereka cepat dalam memberikan tanggapan atau solusi atas pertanyaan masyarakat.
		1. Koordinasi Internal: Seberapa baik koordinasi antara berbagai departemen pemerintah dalam menyampaikan

	Struktur Birokrasi	informasi kepada masyarakat melalui media sosial. Struktur yang baik akan memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar. 2. Fleksibilitas Birokrasi: Kemampuan struktur birokrasi untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat, terutama dalam konteks penggunaan media sosial sebagai alat komunikasi.
--	---------------------------	--

Sumber: diolah peneliti, 2024.

1.8. Argumen Penelitian

Penelitian ini mengkaji judul “Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang” untuk menjawab persoalan yang berkaitan dengan fenomena penggunaan media sosial dalam mengakses informasi publik secara terbuka dan bebas. Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi salah satu sumber utama informasi

bagi masyarakat, terutama bagi Generasi Z yang tumbuh dan berkembang di lingkungan yang sangat terhubung secara digital. Namun, terdapat beberapa masalah yang perlu diidentifikasi dan dianalisis lebih lanjut. Pertama, rendahnya tingkat literasi digital di kalangan Generasi Z di Kota Semarang menjadi tantangan utama. Meskipun generasi ini dikenal sebagai digital natives, banyak dari mereka yang masih kesulitan dalam memahami dan memanfaatkan informasi yang tersedia secara online dengan bijak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kemampuan teknis dalam menggunakan perangkat digital dan kemampuan kritis dalam menganalisis informasi yang diterima. Rendahnya literasi digital ini berkontribusi pada penyebaran hoaks dan misinformasi, yang merupakan masalah kedua yang sering muncul akibat kebebasan berpendapat dan akses informasi publik yang tidak diimbangi dengan pemahaman kritis. Ketiga, banyak anggota Generasi Z merasa tidak terlibat dalam dialog dengan pemerintah, sehingga suara mereka tidak terdengar dalam proses pengambilan keputusan. Ketidaklibatan ini dapat disebabkan oleh kurangnya saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, serta ketidakpahaman mengenai mekanisme keterbukaan informasi publik. Banyak dari mereka yang belum sepenuhnya memahami apa itu keterbukaan informasi publik dan hak mereka untuk mengakses informasi tersebut, sehingga partisipasi aktif mereka dalam proses pemerintahan menjadi terhambat. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, khususnya generasi muda. Selanjutnya, persepsi negatif terhadap media sosial sebagai alat untuk menyampaikan informasi resmi juga menjadi masalah penting. Banyak anggota Generasi Z menganggap media sosial kurang kredibel dibandingkan sumber informasi lainnya,

seperti berita dari media massa atau sumber resmi pemerintah. Persepsi ini dapat mengurangi efektivitas penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi oleh pemerintah untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan penting terkait keterbukaan informasi publik. Penggunaan media sosial dapat menjadi solusi bagi pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif. Munculnya fenomena permasalahan inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang.” Penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana akun resmi pemerintah di media sosial dapat berfungsi sebagai jembatan untuk meningkatkan literasi digital, memperkuat keterlibatan Generasi Z, serta meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak mereka dalam konteks keterbukaan informasi publik. Untuk mendukung analisis ini, penelitian ini akan menggunakan teori terpaan media oleh Rosengren (dalam Rizki & Pangestuti, 2017) dan implementasi kebijakan oleh George C. Edwards III sebagai kerangka acuan. Teori terpaan media akan membantu memahami bagaimana intensitas penggunaan media sosial memengaruhi penerimaan informasi oleh Generasi Z, sementara teori implementasi kebijakan akan memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan keterbukaan informasi publik dapat diterapkan dengan lebih baik melalui saluran komunikasi modern seperti media sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada tetapi juga untuk memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah Kota Semarang

dalam memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi yang efektif dan inklusif. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana media sosial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterlibatan dan literasi digital Generasi Z dalam konteks keterbukaan informasi publik, serta membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat di era digital saat ini.

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam melakukan penelitian dan menentukan tindakan untuk mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus menentukan dan memilih metode yang digunakan untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya selama penelitiannya.

1.9.1. Pendekatan

Penelitian kualitatif membatasi masalah penelitian, berpusat pada fokus, menggunakan kriteria berbeda untuk menilai data, dan menggunakan desain sementara. Hal ini disebabkan karena lebih menekankan pada metode penelitian dibandingkan temuan penelitian sehingga mendapatkan pemahaman umum mengenai realitas sosial dari sudut pandang partisipan atau tujuan lain dari penelitian kualitatif. Pemahaman tidak ditentukan sebelumnya; Sebaliknya, hal ini dicapai melalui analisis realitas sosial yang menjadi fokus utama penelitian. Suatu kesimpulan kemudian dicapai berdasarkan pemeriksaan ini dalam bentuk pemahaman fakta secara keseluruhan dan abstrak.

Dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Penelitian dan Pengembangan, pendekatan deskriptif dijelaskan Sugiyono sebagai strategi yang digunakan untuk menjelaskan atau menafsirkan temuan penelitian tanpa melakukan generalisasi. Metode deskriptif memerlukan pencarian dan penerapan interpretasi yang sesuai. Dalam penelitian deskriptif, situasi tertentu diperiksa, termasuk hubungan, pencarian, opini, dan dampak dari suatu fenomena. Data penelitian ini termasuk dalam kategori data kualitatif yang sering digunakan dalam penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian bersifat kualitatif deskriptif bertujuan memperoleh pengertian serta pemahaman atas suatu peristiwa maupun perilaku manusia dalam suatu organisasi atau institusi. Dalam pendekatan ini, data dikumpulkan sesuai dengan gambaran, kondisi, keadaan dan kenyataan dari fenomena yang diteliti, dan fenomena tersebut dijelaskan sedetail mungkin melalui pengumpulan data tersebut, sehingga pentingnya kedalaman atau detail satu dapat mendemonstrasikan ilmu yang dipelajari. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang secara rinci dan detail untuk dapat menjawab berbagai permasalahan dengan menganalisis data secara mendalam.

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat dilakukannya penelitian. Penentuan lokasi penelitian merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan penentuan lokasi penelitian juga menentukan topik penelitian dan tujuan penelitian, sehingga pekerjaan penelitian para peneliti dapat difasilitasi. Jadi, situs

penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap Keadaan sebenarnya dari objek penelitian untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk penelitian, Penelitian ini berlokasi di Kota Semarang. Alasan peneliti memilih Kota Semarang sebagai situs penelitian karena Kota Semarang sebagai salah satu kota di Jawa Tengah dengan tingkat penduduk yang tinggi dengan pengguna media sosial lebih dari 500.000 terutama Generasi Z yang berada di Kota Semarang pun mencapai 510.695 jiwa.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada individu, objek, atau organisme yang menjadi sumber informasi untuk pengumpulan data. Penentuan subjek penelitian yang tepat sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam mengidentifikasi informan. Hal ini disebabkan karena informasi yang diperoleh dari informan diharapkan dapat membantu menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

Informan dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang memiliki peran dan pemahaman mengenai Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang

Tabel 1 . 4 Tabel Informan

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Informasi Saluran Komunikasi Publik (Diskominfo Kota Semarang)	1 orang
2.	Masyarakat Generasi Z di Kota Semarang	5 orang

Sumber: diolah oleh peneliti, 2024.

1.9.4. Jenis Data

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan berupa teks, kata-kata tertulis, kalimat, dan simbol yang menggambarkan atau merepresentasikan individu, tindakan, dan peristiwa dalam konteks sosial. Oleh karena itu, dalam analisis eksploratif ini, peneliti memusatkan perhatian pada data kualitatif. Secara umum, terdapat dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Data Kuantitatif

Sugiyono (2015) mendefinisikan data kuantitatif sebagai angka atau data kualitatif numerik. Data kuantitatif adalah data yang dapat berupa angka atau bilangan. Dalam bentuk bab ini, data kuantitatif dapat diolah menggunakan rumus matematika atau dianalisis menggunakan sistem statistik.

2) Data Kualitatif

Sugiyono (2015) mendefinisikan data kualitatif sebagai data yang berupa kata-kata, grafik dan gambar. Data kualitatif adalah data yang diterangkan secara lisan atau secara lisan atau lisan. Informasi kualitatif dapat diperoleh melalui wawancara.

1.9.5. Sumber Data

Secara umum data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian di lapangan dan informasi yang diperoleh secara tidak langsung. Data yang diperoleh secara langsung disebut sebagai data primer, data yang diperoleh secara tidak langsung disebut sebagai data sekunder (Sukanto, 2014).

1) Data Primer

Data primer adalah jenis dan sumber data penelitian yang berasal langsung dari sumber pertama (tanpa perantara) atau melalui individu atau kelompok. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sementara itu, peneliti dalam penelitian ini memperoleh data primer melalui kegiatan wawancara mendalam (indepth interview).

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber informasi penelitian yang peneliti peroleh secara tidak langsung melalui media (diperoleh atau disimpan oleh pihak lain). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh peneliti melalui observasi dan studi literatur diperoleh melalui kajian sumber -umber literatur referensi jurnal-jurnal, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dan sesuai dengan topik penelitian ini.

1.9.6. Teknik dan Pengumpulan Data

Penelitian yang berjudul “Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang” ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah:

a. Wawancara mendalam (indepth interview)

Teknik pengumpulan data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perspektif partisipan terhadap topik penelitian. Tujuan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengkontekstualisasikan

orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, emosi, motif, reaksi, atau persepsi, serta tingkat dan bentuk partisipasi.

b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap kondisi lapangan. Jenis observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi non partisipan. Observasi non-partisipan, peneliti mengumpulkan informasi yang diperlukan tanpa menjadi bagian dari situasi

c. Studi literatur

Studi literatur juga digunakan pada penelitian ini sebagai Teknik pendukung. Studi literatur diperoleh melalui literatur referensi jurnal-jurnal, dan bahan bacaan lainnya yang relevan dan sesuai dengan topik penelitian ini.

Adapun Teknik pengambilan sampel dalam penelitian yang berjudul “Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang” menggunakan Teknik *non-probability sampling*. Teknik *non-probability sampling* adalah teknik pengumpulan data atau sampel sehingga semua data kemungkinan besar akan dipilih sebagai sampel yang tidak sama. Ini didasarkan pada pedoman peneliti ketika memutuskan elemen sampling apa yang akan digunakan. Pengambilan sampel dengan metode *non-probability sampling* didasarkan pada kriteria tertentu seperti penilaian, status, kuantitas, dan kesukarelaan.

Adapun teknik *non-probability sampling* yang akan digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. *Puposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan karakteristik objek penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber penelitian ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Semarang (Diskomino). Pada sisi masyarakat seperti Masyarakat pengguna media sosial di Kota Semarang.
- b. *Snowball sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan penelusuran sampel sebelumnya. Menurut Sugiyono (2014), snowball sampling adalah Teknik pengambilan sampel yang awalnya berjumlah kecil tetapi mengembang.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses sistematis untuk mencari dan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengorganisasian data ke dalam kategori, membaginya menjadi unit-unit, menyintesisnya, serta mengorganisasikannya ke dalam model-model yang relevan, kemudian memilih data yang akan digunakan. Penelitian dilakukan dan kesimpulan ditarik dengan cara yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Model analisis data yang diterapkan oleh peneliti adalah etnografi, di mana catatan lapangan diberi kode, diklasifikasikan atau dikelompokkan, dan kemudian disusun secara sistematis berdasarkan hasil analisis data.

Teori yang relevan dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi atau sebagai alat analisis bila diperlukan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dimulai sebelum memasuki lapangan, selama kunjungan lapangan, dan setelah selesai lapangan. Adapun teknik analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles & Huberman (1992: 16) terdiri dari:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menggabungkan dan menyeragamkan semua jenis data yang berbentuk tulisan untuk dianalisis. Peneliti mereduksi informasi yang terkumpul di lapangan dengan menggabungkan, meringkas dan memilih informasi penting dari hasil wawancara subjek.

b. Penyajian Data

Penyajian data, yaitu pengolahan informasi setengah jadi, yang koheren dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur yang jelas. Peneliti menggunakan penyajian data dengan deskripsi singkat dalam bentuk narasi untuk menjelaskan kebijakan keterbukaan informasi publik (KIP).

c. Pengambilan Kesimpulan

Menarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari penelitian kualitatif yang mengaran pada jawaban atas pertanyaan penelitian yang disajikan. Pada tahap ini, perekaman dilakukan dengan pola dan tema yang sama. Tujuan verifikasi data adalah untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang ditemukan. Untuk menghindari kesalahan, kebenaran data yang akan dianalisis harus diperiksa dengan cara seperti berikut ini:

1. Pengumpulan data secara terus menerus pada subyek penelitian yang sama. Hal ini dilakukan agar data penelitian yang didapat melalui subjek penelitian bersifat mendalam dan luas. Sehingga dalam menganalisis (interpretasi) data dapat mempertajam fokus pengamatan dan memperdalam topik yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Triangulasi pada sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Metode triangulasi digunakan untuk mencapai validitas konvergen dan menguji tingkat validitas eksternal, (Denzin, 1978). Konsep triangulasi didasarkan pada penggunaan beberapa sumber (data, metode, dan peneliti) dan dapat menetralkan bias penelitian yang spesifik terhadap sumber data, peneliti, atau metode tertentu (Jick 1979). Teknik triangulasi dilakukan dengan cara mengecek keabsahan data dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan objek penelitian. Teknik triangulasi bertujuan untuk mempelajari perbedaan antara informasi yang diterima oleh seorang informan (informan) dengan informan lainnya sehingga diperoleh informasi yang benar dan akurat.
3. Pengecekan oleh subyek penelitian. Hal ini dilakukan menghindari bias – bias dalam penelitian. Pengecekan informasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana informasi yang diterima sesuai dengan informasi yang diberikan oleh data. Informasi yang diperoleh digunakan untuk menulis laporan sesuai dengan maksud informan.

1.9.8. Kualitas Data (*goodness criteria*)

Triangulasi adalah metode yang diterapkan dalam penelitian kualitatif untuk mengevaluasi dan memastikan keabsahan data dari berbagai sudut pandang, dengan tujuan mengurangi bias dalam proses pengumpulan dan analisis data semaksimal mungkin. Dalam konteks penelitian kualitatif, keabsahan data merujuk pada akurasi hasil penelitian yang mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan didukung oleh bukti yang kuat.

Norman K. Denzin, yang dikutip oleh Mudjia Rahardjo (2012), mendefinisikan triangulasi sebagai kombinasi berbagai metode untuk mempelajari fenomena dari sudut dan perspektif yang berbeda. Menurutnya, triangulasi mencakup (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antarpeleliti (jika penelitian dilakukan dalam kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori. Triangulasi metodologi adalah triangulasi yang dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan wawancara, Observasi, dan survei. Oleh karena itu, peneliti dapat menggunakan wawancara dan observasi untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya untuk membuktikan kebenarannya. Selain itu, peneliti dapat menggunakan berbagai informan untuk memverifikasi kebenaran informasi. Triangulasi ini dilakukan ketika informasi yang diperoleh tidak pasti, tergantung subjek atau peneliti.

1. Triangulasi antar peneliti adalah metode yang melibatkan lebih dari satu orang dalam proses pengumpulan dan analisis data. Teknik ini bertujuan untuk memperkaya data dengan informasi yang diperoleh sesuai dengan objek yang sedang diteliti. Namun, orang yang diundang untuk membantu penggalian data harus memiliki pengalaman dalam penelitian sebelumnya dan bebas dari konflik kepentingan, agar tidak merugikan peneliti dan menghindari timbulnya bias baru.
2. Triangulasi sumber informasi adalah metode di mana kebenaran suatu informasi diperiksa melalui berbagai metode dan sumber yang berbeda. Misalnya, selain wawancara dan observasi, peneliti dapat memanfaatkan observasi partisipatif, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, dokumen resmi, catatan pribadi, serta

gambar atau foto. Setiap metode ini menyajikan bukti atau data yang berbeda, memberikan perspektif yang beragam terhadap realitas yang sedang diselidiki.

3. Triangulasi teoritis merujuk pada proses di mana hasil akhir dari penelitian kualitatif berupa pernyataan informasi atau tesis dibandingkan dengan perspektif teoretis yang relevan. Hal ini bertujuan untuk menghindari bias dari peneliti individu dalam hasil atau kesimpulan. Selain itu, triangulasi teori dapat memperdalam pemahaman, selama peneliti melakukan telaah menyeluruh terhadap informasi teori yang diambil dari analisis data yang diperoleh.

Dalam penelitian terkait " Peranan Terpaan Media Sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Semarang", Triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber. Informasi yang lengkap tersebut kemudian divalidasi oleh berbagai sumber sehingga dapat dijadikan dasar penarikan kesimpulan. Diharapkan melalui teknik triangulasi tersebut, dapat diperoleh validitas data yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Derajat kepercayaan (credibility)

Kriteria tersebut berfungsi membantu melakukan penyelidikan untuk mencapai Kredibilitas pernyataan dan menunjukkan kredibilitas pernyataan melalui bukti kehidupan nyata yang diselidiki oleh peneliti. Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini, peneliti memperkuat hasil, meningkatkan kekokohan penelitian, menganalisis kasus negatif, menggunakan Teknik triangulasi, menggunakan referensi dan menggunakan ulasan anggota yang membandingkan data yang dikumpulkan Oleh peneliti dengan penyedia data (Sugiyono,2009:270).

b. Keteralihan (transferability)

Transferabilitas adalah validitas eksternal penelitian kualitatif. Penjelasan rinci dan mendalam tentang hal dan konteks penelitian dapat diperoleh. Portabilitas tergantung pada kesamaan konseptual dan konteks pengirim dan penerima. Transmisi ini bertujuan agar orang lain dapat memahami hasil penelitian, sehingga peneliti harus melaporkan secara detail, jelas, sistematis dan terpercaya (Sugiyono, 2009:276).

c. Kebergantungan / reliabilitas (dependability)

Penelitian dapat dikatakan dependable apabila orang lain meniru atau dapat mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji reliabilitas dilakukan dengan cara memeriksa keseluruhan proses penelitian. Metode tersebut dilakukan oleh auditor atau supervisor independen untuk meninjau keseluruhan kegiatan penelitian peneliti (Sugiyono, 2009:277).

d. Kepastian / dapat dikonfirmasi (confirmability)

Pengujian Kepastian atau kepastian dalam penelitian kualitatif dikenal dengan pengujian objektivitas penelitian. Verifiable test memverifikasi hasil penelitian terkait dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian yang dilakukan merupakan tugas dan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar verifikasi.